

336
AGY
2

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN DAN KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH
(TAHUN 1998 – 2001)**



TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat S2

Program Studi
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Oleh

VERONIKA WINARTI AGUSTININGTYAS
C4B001135

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
NOPEMBER
2003**

TESIS

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN DAN KOTA
DI PROPINSI JAWA TENGAH (TAHUN 1998 – 2001)

Oleh :

Veronika Winarti Agustiningtyas

C4B001135

Telah disetujui

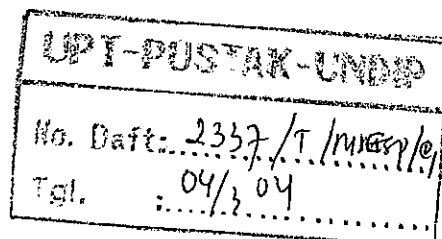
Oleh

Pembimbing Utama

Dr. Imam Ghozali M.Com, Akt

Pembimbing Pendamping

Dra. Tri Wahyu R. Msi



TESIS
ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN DAN KOTA
DI PROPINSI JAWA TENGAH (TAHUN 1998 – 2001)

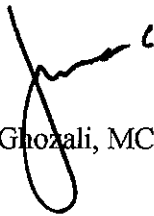
disusun oleh

Veronika Winarti Agustiningtyas
C4B001135

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 13 Nopember 2003
dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat

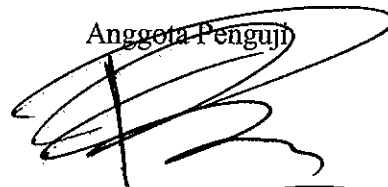
Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama



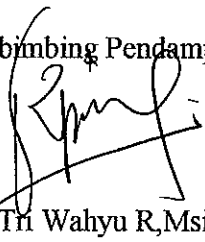
Dr. Imam Ghozali, MCom, Akt

Anggota Penguji



Dr. Purbayu Budi Santoso, MS

Pembimbing Pendamping



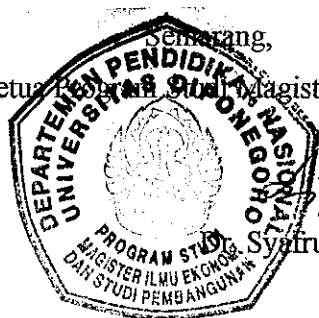
Dra. Tri Wahyu R, Msi

Drs. Bagio Mudakir, MT



Drs. Edy Yusuf AG, Msc

Semarang,
Ketua Dewan Penguji Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan



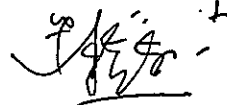
Syahrudin Budiningharto, SU

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalamnya dan daftar pustaka

Semarang, Nopember 2003



(Veronika Winarti Agustingtyas)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 1998 – 2001.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dipenda , Biro Perekonomian Propinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah data *pooling*, yaitu gabungan antara data runtut waktu (*Time series*) selama 4 (empat) tahun yaitu tahun 1998-2001 dan data silang tempat (*Cross Section*) dari 35 kabupaten / kota di Propinsi Jawa Tengah, sehingga diperoleh 140 obyek penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita , jumlah wisatawan , investasi pemerintah dan daya listrik tersambung berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak , sedangkan pengaruh jumlah hotel tidak signifikan terhadap penerimaan pajak.

ABSTRACT

This abstract are purposely to analyzes all the factors of which affected the regional tax earnings of regencies and cities of Central Java Province in 1998 – 2001 periods of time.

The data of which this research used are the secondary one, that have been collected from Statistical Center Organization (BPS / Badan Pusat Statistik) , Central Java Regional Earnings Section (Dipenda Jateng) , and the Province of Central Java's Economic Bureau. The data of which use the pooling technique is combined between time series for four (4) years and Cross Sections from 35 kabupaten / cities in Central Java Province, so have 140 research object the pooling technique are used to examine the samples that have been collected. The analysis method applied in this research with multiple regression analysis .

This research resulted in and show that the annual earnings , total tourist (foreign and domestics) which come in Central Java tourists sites, government's investment, and electricity power that connected to industrial and public consumers have a significant and positive effects on the tax earnings, and the other independent variable, which is the sum of hotels in Central Java Province, are not significant to the regional tax earnings.

KATA PENGANTAR

Segala puji sukur penulis panjatkan kepada Tuhan atas karunia, rahmat, dan kasih sayang yang berlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang merupakan salah satu persyaratan yang ditentukan untuk menyelesaikan studi pascasarjana pada program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Berkat bantuan berbagai pihak tesis dengan judul ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 1998 – 2001 dapat diselesaikan.

Temuan dalam tesis ini tidaklah merupakan hal baru dalam studi mengenai analisis faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Propinsi Jawa Tengah, temuan ini hanya merupakan sumbangan kecil bagi beberapa studi sebelumnya. Berbagai pendekatan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu memberikan inspirasi kepada penulis untuk melakukan penelitian lanjutan meskipun kecil, semoga temuan dalam tesis ini dapat menambah hasil studi sebelumnya paling tidak dari dimensi ruang dan waktu.

Banyak pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam penulisan tesis ini. Walaupun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin namun disadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, karenanya sangat diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya, khususnya kepada :

1. Bapak Dr. Syafrudin Budiningharto, SU, selaku Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.
2. Bapak Dr. Imam Ghozali, M.Com, Akt, selaku Pembimbing Utama.
3. Ibu Dra. Tri Wahyu R., Msi, selaku Pembimbing Pendamping.
4. Bapak Gubernur Propinsi Jawa Tengah, Ibu Kepala Badan Diklat Propinsi Jawa Tengah yang telah memberikan kesempatan dan pendanaan kepada penulis untuk melanjutkan studi sebagai mahasiswa tugas belajar di program MIESP – UNDIP Semarang.

5. Kedua orang tuaku, suamiku dan anak – anaku, saudara – saudaraku, sahabat – sahabatku, teman sejawat, yang kesemuanya selalu mendorong, memberikan semangat dan mendoakan selama penulis menempuh studi di program MIESP – UNDIP Semarang.
6. Bapak / Ibu staf pengajar dan karyawan pada program pascasarjana MIESP – UNDIP Semarang serta semua pihak yang turut serta memberikan kelancaran studi pada penulis yang tidak dapat terlupakan.
Akhirnya, dengan penuh kerendahan hati dan suka cita, penulis mengharapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi pihak – pihak yang membutuhkannya.

Semarang, Nopember 2003

Penulis

Veronika Winarti Agustiningtyas

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
TEORITIS.....	11
2.1 Tinjauan Pustaka.....	11
2.1.1 Pajak.....	11
2.1.2 Fungsi dan Sistem Pemungutan Pajak.....	16
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah.....	19
2.1.4 Pajak Daerah.....	22

2.2	Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penyerimaan Pajak	
	Daerah	30
2.2.1	Peranan Pemerintah.....	30
2.2.2	Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.....	33
2.2.3	Pendapatan per Kapita.....	37
2.2.4	Jumlah Wisatawan.....	40
2.2.5	Jumlah Hotel	44
2.2.6	Investasi Pemerintah Daerah.....	46
2.2.7	Daya Listrik Tersambung.....	48
2.3	Penelitian Terdahulu.....	49
2.4	Kerangka Pemikiran	56
2.5	Hipotesis	57
BAB III	METODE PENELITIAN	59
3.1	Jenis dan Sumber Data	59
3.2	Metode Pengumpulan Data	60
3.3	Definisi Operasional Variabel Penelitian	60
3.4	Metode Analisis.....	61
	3.4.1 Metode analisis.....	61
	3.4.2 Alat Analisis.....	63
BAB IV	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	64
4.1	Keadaan Wilayah.....	64
4.2	Jumlah Penduduk.....	66
4.3	Pendapatan Perkapita.....	68
4.4	Jumlah Wisatawan.....	70

4.5	Jumlah Hotel.....	74
4.6	Jumlah Investasi Pemerintah	76
4.7	Jumlah Daya Listrik Tersambung.....	80
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	84
5.1	Hasil Pengujian Data	84
5.1.1	Uji Penyimpangan Asumsi Klasik.....	84
5.1.1.1	Uji Multikolinieritas	85
5.1.1.2	Uji Autokorelasi	86
5.1.1.3	Uji Heteroskedastisitas.....	87
5.1.2	Pengujian Statistik	89
5.1.2.1	Uji statistik F.....	89
5.1.2.2	Koefisien Determinasi.....	90
5.1.2.3	Uji statistik t	90
5.2	Interpretasi Model.....	91
5.3	Pembahasan	93
BAB VI	PENUTUP.....	98
6.1	Simpulan.....	98
6.2	Rekomendasi Kebijakan.....	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1 Kontribusi PAD dalam penerimaan Daerah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah (Dalam Ribu Rupiah)	2
Tabel 1.2 Kontribusi Pajak Daerah dalam penerimaan Daerah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah (Dalam Ribu Rupiah)	3
Tabel 1.3 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah Se Propinsi Jawa Tengah (Dalam Ribu Rupiah)	4
Tabel 2.1 Daya Listrik Tersambung Propinsi Jawa Tengah (1998- 2001)	48
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	53
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berumur 10 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja yang sedang bekerja.....	67
Tabel 4.2 PDRB per kapita Kabupaten /Kota di Jawa Tengah ADHK 1993 tahun 1998-2001 (Juta Rupiah)	69
Tabel 4.3 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara di Propinsi Jawa Tengah (1998-2001).....	71
Tabel 4.4 Jumlah Wisatawan menurut Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa tengah	72
Tabel 4.5 Jumlah Hotel menurut Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa tengah	75
Tabel 4.6 Besarnya Realisasi Pengeluaran Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota di Jawa Tengah 1998-2003	78
Tabel 4.7 Besarnya Daya Listrik Tersambung menurut Kabupaten /Kota di Jawa Tengah 1998-2003.....	83
Tabel 5.1 Hasil Perhitungan Regresi Awal	85
Tabel 5.2 Perbandingan nilai R2 dari model awal atau utama dengan R2 model <i>auxiliary regression</i> antar variable penjelas.....	86
Tabel 5.3 Hasil Persamaan Regresi Tertimbang	88

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1.1 Tingkat Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah Se Propinsi Jawa Tengah Th.1992-2001	7
Gambar 1.2 Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah Se Propinsi Jawa Tengah Th.1992-2001	8
Gambar 2.1 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	37
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis	57

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Data Variabel Pajak Daerah (R) , PDRB per kapita (PP) , Jumlah Wisatawan (W), Jumlah Hotel (H), Anggaran Pembangunan Pemerintah (IG), dan Daya Listrik (DL)
- Lampiran 2 : Data Nilai Log Penerimaan Pajak Daerah (L_R) ,P DRB per kapita (L_PP) , Jumlah Wisatawan (L_W), Jumlah Hotel (L_H), Anggaran Pembangunan Pemerintah (L_IG), dan Daya Listrik (L_DL)
- Lampiran 3 : Hasil Persamaan Regresi Awal
- Lampiran 4 : Hasil Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 5 : Hasil Persamaan Regresi Tertimbang
- Lampiran 6 : Coefficient Covariance Matrix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Pembangunan daerah diartikan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, dilaksanakan melalui otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat serta pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah).

Diberlakukannya UU No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, maka daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur daerahnya sendiri termasuk pembiayaan atas pengeluaran yang terjadi.

Kabupaten / kota di Propinsi Jawa Tengah sebagai daerah - daerah otonom dituntut mampu membiayai pengeluarannya dari sumber-sumber penerimaan yang ada di daerah tanpa tergantung pemerintah pusat atau pemerintah propinsi dan diberikan sumber - sumber keuangan untuk membiayai pengeluarannya, antara lain Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba dari perusahaan daerah, penerimaan dinas - dinas dan pendapatan lain- lain yang merupakan sumber pendapatan murni daerah sebagaimana di atur dalam UU No 34 tahun 2000

UPT-PUSTAK-UNDIP

Untuk mengetahui kondisi umum PAD Kabupaten / kota di Propinsi Jawa Tengah, dapat dilihat pada realisasi PAD Kabupaten / kota di Propinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun (selama sepuluh tahun terakhir), sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Kontribusi PAD dalam Penerimaan Daerah
35 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah
(dalam ribu rupiah)

Tahun	Penerimaan	PAD	Kontribusi
1992/1993	650657748	137.033.155	21,06%
1993/1994	758520069	156.646.445	20,65%
1994/1995	913522963	195.903.898	21,44%
1995/1996	1068452332	231.638.277	21,68%
1996/1997	1493352640	260.302.589	17,43%
1997/1998	2041363455	295.221.664	14,46%
1998/1999	2582587873	335.661.162	13,00%
1999/2000	3451911469	377.881.486	10,95%
2000	3181656560	365.958.442	11,50%
2001	8119924529	678.949.049	8,36%

Sumber : Statistik Keuangan Daerah 1992-2003 (diolah)

Dari Tabel 1.1 , kontribusi PAD pada sepuluh tahun terakhir sejak tahun 1992/1993 sampai dengan tahun 2001 dalam penerimaan daerah pada 35 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah semakin menurun, angka tertinggi dicapai pada tahun anggaran 1995/1996 sebesar 21,68 % dan terus menurun pada tahun-tahun berikutnya walaupun secara nominal meningkat dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 13,71 % pertahun .

Dari PAD yang ada, kontribusi sektor pajak daerah dalam struktur PAD dapat dilihat pada Tabel 1.2 .

Tabel 1.2
Kontribusi Pajak Daerah Dalam PAD Kab/Kota
di Propinsi Jawa Tengah Tahun 1992 s/d 2001
(dalam Ribu Rupiah)

Tahun	PAD	Pajak Daerah	Persentase
1992/1993	137.033.155	30.744.337	22,44%
1993/1994	156.646.445	38.448.430	24,54%
1994/1995	195.903.898	51.265.386	26,17%
1995/1996	231.638.277	61.214.033	26,43%
1996/1997	260.302.589	74.731.085	28,71%
1997/1998	295.221.664	82.876.911	28,07%
1998/1999	335.661.162	97.894.999	29,16%
1999/2000	377.881.486	132.266.499	35,00%
2000	365.958.442	124.282.901	33,96%
2001	678.949.049	200.308.875	29,50%

Sumber : Statistik Keuangan Daerah 1992-2001 (diolah)

Dari Tabel 1.2 di atas, terlihat bahwa dukungan sektor pajak daerah dalam struktur PAD masih sangat rendah. Alfian Lains (1985) menyatakan bahwa rendahnya kontribusi pajak daerah dalam PAD disebabkan terbatasnya wewenang daerah untuk memungut pajak daerah sebagai akibat telah dijadikannya pajak – pajak yang cukup besar hasilnya di daerah sebagai pajak sentral dan dipungut oleh pemerintah pusat. Disamping itu, relatif rendahnya pajak daerah erat pula kaitannya dengan pendapatan masyarakat yang masih rendah. Dalam Tabel 1.3 dapat dilihat besar pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah Kabupaten / Kota se Propinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.3
Penerimaan Pajak Daerah Kab/Kota
Se Propinsi Jawa Tengah Tahun 1992 s/d 2001
(dalam Ribu Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	1992/1993	1993/1994	1994/1995	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000	2001
1	Kab. Cilacap	834.200	1.024.600	1.443.000	1.649.713	2.033.330	2.796.664	7.902.868	18.129.845	14.424.275	18.954.183
2	Kab. Banyumas	1.132.163	1.430.634	1.989.642	2.177.518	2.659.004	3.497.940	3.762.257	4.545.544	3.710.146	6.558.648
3	Kab. Purbalingga	252.000	294.000	380.000	516.448	626.359	840.190	1.067.562	1.270.710	1.107.156	2.232.926
4	Kab. Banjarnegara	339.859	406.639	549.648	656.392	788.287	814.857	1.176.446	1.286.306	1.143.458	1.978.674
5	Kab. Kebumen	462.483	537.054	763.330	920.455	1.136.254	1.274.584	1.482.989	1.639.906	1.587.720	2.528.169
6	Kab. Purworejo	374.480	425.707	567.540	680.138	713.744	925.239	951.879	1.280.663	1.245.304	2.249.817
7	Kab. Wonosobo	387.940	434.756	529.276	626.508	732.670	807.082	1.319.133	1.526.944	1.257.477	2.339.585
8	Kab. Magelang	650.000	862.000	1.079.000	1.396.812	1.714.179	2.288.685	3.062.414	5.394.997	6.905.140	10.947.677
9	Kab. Boyolali	410.140	527.000	714.490	908.110	1.161.699	1.362.459	1.687.121	1.934.156	2.233.239	2.989.750
10	Kab. Klaten	969.000	1.088.000	1.363.000	1.534.509	1.759.336	1.996.558	2.477.115	3.191.856	2.134.682	4.834.844
11	Kab. Sukoharjo	929.972	1.284.354	1.766.512	1.898.798	2.233.134	2.438.027	2.525.139	3.400.865	3.127.470	5.837.954
12	Kab. Wonogiri	420.000	514.000	710.000	891.504	1.078.797	1.244.996	1.127.568	2.151.391	1.425.353	638.634
13	Kab. Karanganyar	816.950	1.042.968	1.395.528	1.586.956	1.929.825	2.664.707	2.902.296	3.794.518	4.784.036	5.499.093
14	Kab. Sragen	551.070	787.057	915.549	1.037.805	1.386.858	1.301.346	1.385.154	1.711.161	1.728.718	2.921.455
15	Kab. Grobogan	436.910	474.038	758.909	911.540	1.124.827	1.078.161	1.458.417	1.692.017	1.397.031	2.237.597
16	Kab. Blora	450.492	533.352	682.494	781.037	971.096	1.092.510	1.172.369	1.260.745	1.094.234	1.876.666
17	Kab. Rembang	331.981	332.660	565.404	641.014	641.014	797.026	731.741	1.091.125	1.191.676	2.233.521
18	Kab. Pati	626.370	819.630	1.064.590	1.276.994	1.512.177	1.667.882	1.465.677	2.710.631	1.595.380	3.748.873
19	Kab. Kudus	986.178	1.196.769	1.470.495	1.653.224	1.886.824	2.162.931	2.415.285	2.934.203	2.863.314	4.845.280
20	Kab. Jepara	264.737	345.612	572.970	800.780	1.148.004	1.341.155	1.341.155	2.647.863	2.437.600	4.089.837
21	Kab. Demak	355.049	546.228	650.771	851.282	1.036.447	1.233.958	1.487.296	1.691.088	1.479.240	2.561.404
22	Kab. Semarang	881.854	1.225.098	1.706.900	2.221.945	2.782.695	3.079.333	2.292.974	4.127.396	4.108.669	6.645.836
23	Kab. Temanggung	404.987	448.350	608.083	694.919	826.220	826.220	943.637	1.463.229	864.248	2.487.563

Tabel 1.3 (lanjut)

24	Kab.Kendal	582.372	793.427	1.222.819	1.589.012	1.897.314	2.690.369	3.799.233	5.478.333	5.471.719	8.163.284
25	Kab.Batang	237.948	311.365	484.572	622.275	764.727	865.171	1.189.789	1.557.056	1.697.054	2.508.743
26	Kab.Pekalongan	380.600	480.700	661.300	740.280	891.833	1.041.894	1.258.054	1.816.127	1.494.910	2.811.466
27	Kab.Pemalang	564.216	733.365	752.636	1.214.362	1.427.324	1.694.048	1.862.771	2.295.419	1.931.495	3.103.907
28	Kab.Tegal	632.300	802.560	1.089.400	1.301.273	1.681.626	1.445.181	1.712.356	2.565.087	2.036.358	3.793.119
29	Kab.Brebes	430.489	564.904	798.961	1.022.669	1.206.442	1.450.418	1.907.884	2.462.915	2.841.661	3.601.454
30	Kota Magelang	383.268	501.519	635.619	690.320	777.590	973.038	957.546	1.311.282	1.212.657	1.798.813
31	Kota Surakarta	2.708.963	3.357.498	4.634.738	5.881.666	9.473.566	7.535.328	7.903.412	9.157.948	9.612.536	15.880.303
32	Kota Salatiga	312.130	446.636	720.792	799.915	904.815	979.556	1.256.146	1.318.081	1.372.563	2.327.256
33	Kota Semarang	9.820.000	12.091.000	15.547.000	18.503.361	21.211.073	23.752.169	26.358.195	29.311.535	29.311.535	49.079.378
34	Kota Pekalongan	795.220	944.336	1.364.316	1.295.823	1.324.259	1.483.899	1.805.108	2.112.062	1.800.851	3.224.466
35	Kota Tegal	618.016	840.614	1.126.102	1.236.666	1.287.776	1.433.330	1.746.003	2.003.496	1.653.996	2.778.700
	Jumlah	30.744.337	38.448.430	51.265.386	61.214.033	74.731.085	82.876.911	97.894.999	132.266.499	124.282.901	200.308.875

Sumber : Statistik Keuangan Daerah 1992-2001

Dari Tabel 1.3, pendapatan sektor pajak daerah dari 35 kabupaten / kota di propinsi Jawa Tengah terlihat adanya kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Pendapatan tertinggi dicapai tahun 2001 dan pada hampir semua daerah mengalami penurunan pada tahun 2000. Penurunan tersebut disebabkan adanya perubahan tahun anggaran yang tadinya dimulai setiap 1 April s/d 31 Maret tahun berikutnya berubah menjadi 1 Januari s/d 31 Desember tahun yang sama. Tahun 2000 yang merupakan tahun dimulainya perubahan tahun anggaran tersebut dihitung dari 1 April 2000 s/d 31 Desember sehingga data terlihat menurun. Pada tahun 2001, pendapatan sektor pajak kembali tercatat meningkat cukup tinggi

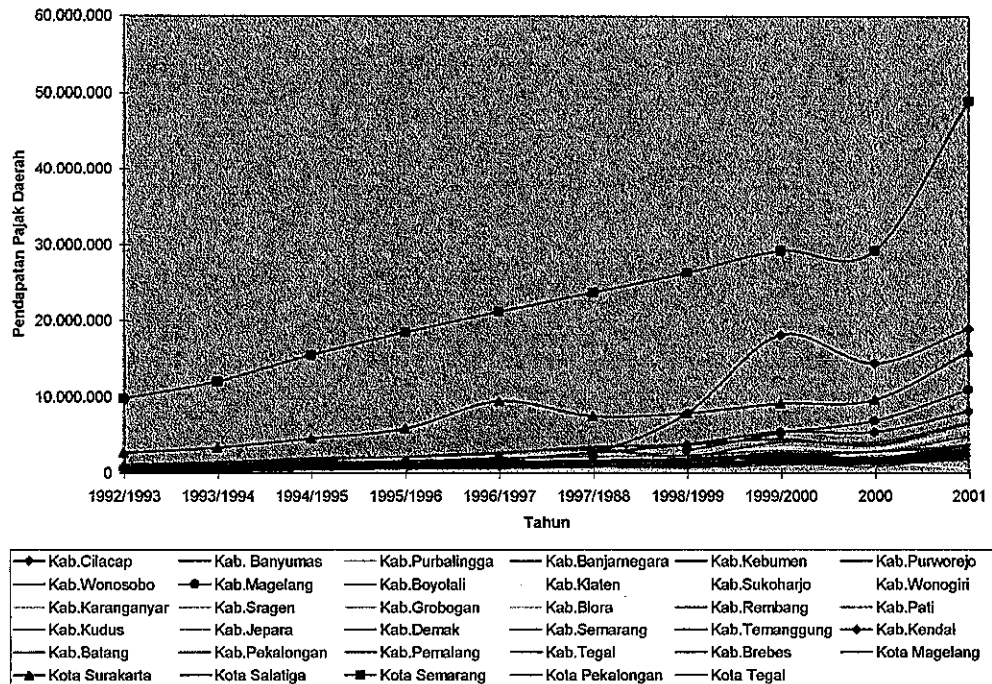
Apabila pendapatan pajak daerah tersebut dituangkan dalam bentuk grafik (Grafik 1.1) , akan terlihat bahwa tingkat pendapatan pajak daerah pada Kabupaten / kota se propinsi Jawa Tengah memiliki kecenderungan meningkat dan mencapai titik tertinggi tahun 2001.

Namun peningkatan pajak daerah tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan peningkatan kontribusinya dalam PAD karena sebagaimana tersebut di atas kontribusi tertinggi yang dicapai pada tahun 1999/2000 hanya sebesar 35 %.

Kondisi keuangan daerah sebagaimana tersebut di atas merupakan karakteristik kondisi keuangan negara sedang berkembang termasuk Indonesia yang sebagaimana disebutkan oleh Harold A Aldefer (1964) dalam Alfian Lains (1985) . Karakteristik tersebut antara lain karena kontribusi pajak daerah dan PAD terhadap penerimaan daerah total sangat

kecil karena hampir semua pajak daerah telah dijadikan pajak sentral dan dipungut oleh pemerintah pusat.

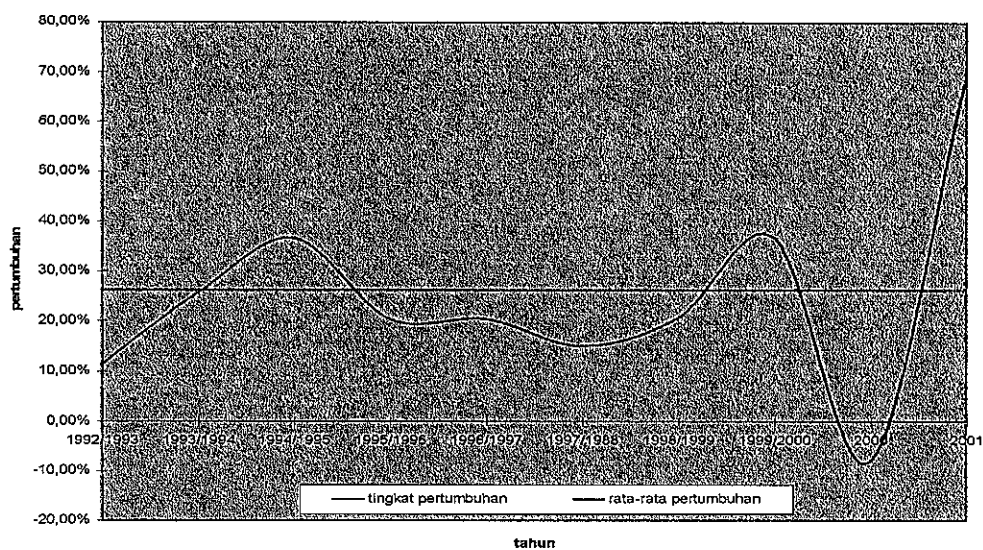
Gambar 1.1.
Tingkat Penerimaan Pajak Daerah
Kabupaten / Kota Se Propinsi Jawa Tengah
Tahun 1992 s/d 2001



Sumber : Statistik Keuangan Daerah 1992-2001

Pada tahun 2000, diberlakukan UU no 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Pemberlakuan Undang – undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan PAD secara signifikan. Sejauhmana pengaruh UU tersebut masih memerlukan penelitian lebih lanjut ,namun bila dilihat tingkat pertumbuhannya,pertumbuhan pajak daerah selama sepuluh tahun terakhir masih sangat fluktuatif sebagaimana terlihat dalam Gambar

Gambar 1.2.
Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah
Kabupaten / Kota Se Propinsi Jawa Tengah
Tahun 1992 s/d 2001



Sumber : Statistik Keuangan Daerah 1992-2001

Melihat masih begitu fluktuatifnya tingkat pertumbuhan pajak daerah pada tahun 2001 di 35 Kabupaten / Kota Propinsi Jawa Tengah, perlu dianalisis faktor faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan pajak daerah tersebut .

1.2. Rumusan Masalah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah bagi kabupaten / kota di Jawa Tengah yang cukup potensial. Namun demikian kontribusinya terhadap PAD masih cukup rendah, bahkan cenderung mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir. Oleh sebab itu sangat menarik untuk mengkaji sejauhmana faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah bagi kabupaten / kota di Jawa Tengah.

Apabila pendapatan yang berasal dari pajak daerah (R) dipengaruhi oleh tingkat pendapatan per kapita masyarakat, jumlah wisatawan yang mewakili pajak hotel dan restoran, pengeluaran pemerintah daerah sebagai bentuk peranan pemerintah daerah dan jumlah energi listrik yang tersambung mewakili pajak penerangan jalan, maka dapat dirumuskan bahwa pajak daerah merupakan fungsi pendapatan perkapita (PP) , jumlah wisatawan (W), jumlah hotel (H) , pengeluaran pembangunan pemerintah daerah (IG) dan daya listrik yang digunakan oleh masyarakat (DL), maka penulis ingin melihat bagaimana pengaruh pendapatan perkapita, jumlah wisatawan, jumlah hotel, pengeluaran pembangunan pemerintah daerah dan daya listrik tersambung yang ada terhadap pajak daerah yang merupakan salah satu unsur dari PAD di Jawa Tengah pada tahun 1998 -2001

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kabupaten /Kota di Propinsi Jawa Tengah .
2. Menganalisis faktor-faktor dominan yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kabupaten /Kota di Propinsi Jawa Tengah

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang Analisis faktor- faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di propinsi Jawa Tengah tahun 1998 s/d 2001 ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai :

1. Bahan masukan pengambil keputusan dan pembuat kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan daerah dan pendapatan daerah.
2. Menambah khasanah kepustakaan , memperluas pengetahuan dan wawasan bagi penulis serta yang berminat meneliti dibidang ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan konsentrasi pembangunan perekonomian daerah.

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1. Tinjauan Pustaka.

2.1.1. Pajak.

Pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara / pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.

Menurut Adriani (Sudarsono, 1994), pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Smects (Sudarsono, 1994), menyatakan bahwa Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang menurut norma – norma umum yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang ditunjukkan dalam hal yang individual ; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah, sementara menurut Mangkoesobroto (1998), pajak adalah pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya.

Pierson dalam buku Amin Widjaja Tunggal (1995), mengartikan pajak sebagai sumbangan wajib kepada keuangan umum yang tidak merupakan pembayaran langsung terhadap jasa yang diberikan oleh negara kepada si pembayar pajak.

Menurut Rochmat Soemitro (Tjahjono dan Husein, 1993) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (Peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan pada saat pidato di depan wisuda sarjana Universitas Parahyangan yang kemudian dicantumkan dalam buku Pajak dan Pembangunan sebagai berikut : Pajak adalah peralihan dari pihak ketiga kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*" (Tjahjono dan Husein, 1993).

Definisi yang lain dikemukakan oleh Djajadiningrat (Tjahjono dan Husein, 1993) sebagai berikut : Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan . Kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Berdasarkan beberapa rumusan di atas, dapat dipahami beberapa ciri-ciri pajak sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan undang- undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tersebut dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
3. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari negara.
4. Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih surplus digunakan untuk "*Public investment*".
5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.
6. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak *budgeter* yaitu mengatur (Djajadiningrat dalam Tjahjono dan Husein, 1993).
7. Fungsi pajak : sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Dalam sistem keuangan negara, pajak merupakan bagian yang cukup penting sebagai penerimaan negara dalam anggaran (budget) suatu negara (Pandiangan,2002). Indonesia telah lama menempatkan pajak sebagai

sumber penerimaan negara. Dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (2) diamanatkan bahwa “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang Undang”. Ini menunjukkan bahwa sejak awal kemerdekaan para pendiri negara (*founding fathers*) telah menempatkan pajak dalam konstitusi negara. Walaupun penarikan pajak akan mengurangi daya beli masyarakat, namun pada akhirnya pajak digunakan kembali oleh pemerintah untuk membiayai pengeluarannya, sehingga disini peran pajak untuk menjaga kestabilan ekonomi sangat penting (Miyasto dkk,1990) oleh karenanya sangat diperlukan struktur pajak yang baik .

Dalam perkembangannya, untuk menyesuaikan pajak dengan iklim dan kondisi perekonomian negara, pemerintah melakukan reformasi terhadap perpajakan baik atas pajak pusat / nasional maupun pajak daerah. Reformasi pajak adalah proses perubahan atas sistem perpajakan yang ada yang tidak atau kurang sesuai dengan kondisi yang berkembang mengarah pada sistem yang lebih baik (Sutrisno, 1998 dalam Sriyana 1998). Salah satu tujuan reformasi perpajakan di Indonesia adalah untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan untuk mengurangi defisit APBN (Lumbantoruan,1997), disamping untuk menciptakan suatu sistem pajak yang lebih sederhana, lebih meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat dan untuk meningkatkan dan mengamankan penerimaan negara.

Mengenai pajak yang baik, jika memenuhi syarat – syarat tertentu seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith , bahwa suatu peraturan pajak yang adil harus memenuhi empat syarat yaitu :

1. *Equality and equity* (kesamaan dan keadilan)

Artinya bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama.

2. *Certainty* (kepastian hukum)

Artinya dalam membuat undang - undang dan peraturan - peraturan yang mengikat umum, harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain.

3. *Convenience of Payment* (Ketetapan)

Artinya pajak harus dipungut pada saat yang tepat , yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang , ini akan mengenakan wajib pajak (convenient)

4. *Economics of collection*

Artinya dalam membuat Undang – Undang pajak yang baru, para konseptor wajib mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus relative kecil dibanding dengan uang pajak yang masuk (Rochmat Soemitro, 1990 : 15-27)

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada dasarnya pajak diorientasikan kepada penanganan serta pelaksanaan yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan kepastian hukum sehingga dengan hal tersebut dapat menjadikan masyarakat secara sadar dan sukarela untuk membayar jumlah pajak yang terhutang.

Pemerintah dalam melakukan pungutan pajak didasarkan atas :

1. *Benefit approach* atau pendekatan manfaat , merupakan dasar fundamental atau dasar filsafati (filosofis) yang membenarkan Negara mengadakan pemungutan pajak sebagai pungutan yang dapat dipaksakan dalam arti mempunyai upaya pemaksa untuk melaksanakannya.
2. *Ability of pay approach* atau pendekatan kemampuan adalah pendekatan individual terhadap setiap orang atau setiap warga Negara sebagai wajib pungut (termasuk wajib iuran). Berdasarkan pelaksanaan azas keadilan dalam perpajakan yang harus selalu diterapkan dalam setiap aspek penerimaan ataupun pengeluaran pemerintah (*Iustitia distributive* , *Iustitia egalitaris*, *Iustitia protektiva*, dan lain- lain, maka harus melihat warga Negara dari segi kemampuannya) (Sutrisno, 1982 : 155-156).

2.1.2 Fungsi dan Sistem Pemungutan Pajak

Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan. Penyelenggaraan otonomi daerah itu menurut kemampuan pemerintah daerah untuk dapat menggali potensi ekonomi di daerah dengan harapan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dana

pembangunan yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah tentunya harus diimbangi dengan penerimaan pemerintah. Pengeluaran pemerintah tersebut, membutuhkan biaya yang semakin bertambah sehingga pemerintah harus mengusahakan sumber pendanaan yang berasal dari pajak atau pungutan lainnya. Penerimaan pajak diharapkan menjadi andalan dari penerimaan dalam negeri, sehingga dapat memperkuat kemandirian daerah dalam membiayai segala kegiatan pembangunan dengan mengandalkan pajak sebagai tulang punggungnya.

Untuk dapat merealisasikan tujuan pembangunan perlu banyak memperhatikan sumber – sumber pendanaan yang memadai. Salah satu usaha untuk mewujudkan tujuan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Pajak dilihat dari pemungutannya menurut Brotodiharjo (Mardiasmo , 2000) mempunyai dua fungsi :

1. Fungsi Budgeter

Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara / daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat / daerah.

2. Fungsi pengaturan

Merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat / daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar sektor keuangan negara / daerah , konsep ini paling sering dipergunakan pada sektor swasta.

Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak tersebut diatas, dapat dipahami atau dimengerti bahwa fungsi budgeter pajak dikaitkan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara umumnya dan anggaran pendapatan daerah pada khususnya dimaksudkan untuk mengisi kas negara / daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat / daerah

Adapun sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu (Waluyo dan Wirawan,1999)

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri- cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c. Fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi

3. *Withholding System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada piha ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.3. Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan adalah hasil pencaharian (usaha dan sebagainya), perolehan atau sesuatu yang didapatkan (dibuat dan sebagainya) yang sebelumnya belum ada. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berlaku, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku (Poerwodarminto , 1976).

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber – sumber keuangan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain. Kemampuan daerah dalam membiayai sendiri pembangunan daerahnya masih mengalami kendala berupa rendahnya kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Indikator rendahnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dapat dilihat dari Indeks Kemampuan Rutin daerah (IKR) yang diperoleh dari besarnya perubahan PAD terhadap pengeluaran rutin daerah dalam persentase pada tahun yang sama (Radianto, 1997:42).

Pengertian PAD menurut JB. Kristiadi (1985) adalah pendapatan daerah yang bergantung pada keadaan ekonomi pada umumnya dan potensi dari sumber – sumber PAD itu sendiri.

Sedangkan menurut Alfian Lains (1985) PAD adalah penerimaan rutin didalam APBD yang berasal dari daerah yang bersangkutan sumber PAD itu sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan perusahaan daerah, penerimaan dinas – dinas dan lain – lain.

Rendahnya angka PAD dapat menunjukkan masih tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat serta menunjukkan masih terbatasnya peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan (Jaka Sriyana , 1999) walaupun seberapa besar peranan PAD

yang ideal juga masih sulit dijawab karena belum ada pedoman yang pasti untuk menentukan besarnya PAD yang ideal bagi suatu daerah (Munawar Ismail , 2001). Hal tersebut dikarenakan faktor – faktor yang mempengaruhi derajat kemandirian daerah terus berkembang .

Widayat (2000) mengemukakan faktor – faktor yang mempengaruhi rendahnya PAD Pemerintah Kabupaten / Kota antara lain :

1. Banyak sumber pendapatan Kabupaten / Kota yang besar tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. BUMD belum banyak bisa memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lain.
4. Adanya kebocoran – kebocoran
5. Biaya Pungut yang masih tinggi
6. Banyak Peraturan Daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan
7. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.

Menurut Munawar Ismail (2000) rendahnya PAD dalam struktur penerimaan daerah disebabkan karena sumber – sumber yang masuk dalam kategori PAD umumnya bukan merupakan sumber potensial bagi daerah. Sumber potensial di daerah sudah diambil oleh pusat sebagai sumber

penerimaan pusat, sehingga yang tersisa di daerah hanya sumber –sumber yang kurang potensial. Sebab yang lain adalah belum intensifnya pelaksanaan pajak dan retribusi daerah

Jaka Sriyana (1998) menyatakan bahwa proses peningkatan PAD ditentukan oleh bermacam aspek dan keterkaitan kegiatan ekonomi antar sektor.

2.1.4. Pajak Daerah

Pajak daerah sesuai pasal 1 angka 6 UU No. 34/2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah daerah dan pembangunan Daerah.

Menurut Soemitro (1988) , pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan untuk pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan publik, sedangkan mengenai lapangan pajak daerah adalah pajak yang belum dipungut oleh pemerintah pusat juga terhadap hal – hal yang pada umumnya mempunyai sifat kedaerah.

(Hirawan, 1991) menyatakan pajak daerah adalah pungutan menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

Dalam Ensiklopedi Perpajakan Indonesia (Lumbantoruan, 1997), Pajak Daerah diartikan sebagai pajak yang dipungut oleh pemerintah tingkat daerah untuk pembiayaan rumah tangganya.

Menurut Davey (1998) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik dan digolongkan menjadi dua macam sesuai dengan pembagian administratif yaitu :

1. Pajak Daerah
2. Pajak Daerah kabupaten /kota

Sedangkan Devas (1989) menjelaskan bahwa pajak daerah diartikan sebagai berikut :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan pemerintah daerah
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasi oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi hasilkan dengan atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah.

Penerimaan pemerintah diartikan sebagai penerimaan pemerintah dalam arti seluas – luasnya yaitu meliputi penerimaan pajak dan bukan pajak. Sesuai kewenangan memungut pajak, maka pajak dibedakan menjadi 2 yaitu : pajak Negara atau pajak pusat dan pajak daerah. Pengertian pajak daerah sama dengan pengertian pajak pusat, namun terdapat beberapa perbedaan yaitu :

1. Pajak Negara ditetapkan dan dikelola oleh pemerintah pusat (oleh direktorat jendral pajak)
2. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan dengan peraturan daerah atau merupakan pajak Negara yang pengelolaannya dan penggunaannya memang khusus diserahkan kepada daerah.

Pajak daerah mempunyai tolok ukur yang oleh Nick Devas dkk (1989) dinyatakan antara lain :

1. Hasil (*Yield*)
Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya , stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu ; dan elastisitas terhadap inflasi , pertumbuhan penduduk dan sebagainya , juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.
2. Keadilan (*Equity*)
Dasar pajak dan kewajiban membayar pajak harus jelas dan tidak sewenang – wenang , pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama benar antara

berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama ; harus adil secara vertikal artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi ; dan pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat, dalam arti hendaknya tidak ada perbedaan – perbedaan besar dan sewenang- wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah yang lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara penyediaan layanan masyarakat.

3. Daya guna ekonomi (*Economic Efficiency*)

Pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya –tidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi; mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah satu arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil “beban lebih “ pajak.

4. Kemampuan melaksanakan (*Ability to implement*)

Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan , dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.

5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*Suitability as a local revenue source*) .

Harus jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan , dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan

tempat akhir beban pajak ; pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan obyek pajak dari suatu daerah ke daerah lain: pajak daerah jangan hendaknya mempertajam perbedaan – perbedaan antara daerah , dari segi potensi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Berdasarkan teori perpajakan , Musgrave and Musgrave (1989) ; Anwar Shah (1994) , besar kecilnya penerimaan di sektor pajak akan sangat ditentukan oleh (1) *Pendapatan perkapita*, (2) *Jumlah penduduk*, baik pusat maupun daerah . Apabila pendapatan rata-rata meningkat maka perubahan dalam pola konsumsi bagi perekonomian secara keseluruhan akan terjadi yang berakibat pada penerimaan pajak. Jadi pendapatan perkapita berpengaruh (+) / positif terhadap penerimaan pajak daerah. Begitu pula dengan jumlah penduduk, disini dibatasi dengan jumlah penduduk yang bekerja. Penduduk bekerja berarti memiliki pendapatan sedangkan pendapatan telah diterima secara luas sebagai ukuran untuk menentukan kemampuan membayar pajak sehingga dikatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah.

Agus Wantara (1997) mengatakan bahwa besar kecilnya penerimaan di sektor pajak juga dipengaruhi 1. *laju inflasi* dan 2. *laju wisatawan asing/domestik* . Pembangunan yang mengatasi pengangguran besar-besaran dan penggunaan modal yang sangat rendah tidaklah mampu menyediakan output yang dibutuhkan secara cepat, dalam keadaan demikian kenaikan

tingkat pengeluaran cenderung tercermin pada kenaikan harga. Karena diperkirakan kebijakan fiskal yang cermat untuk menghindarkan inflasi. Di pihak lain, inflasi juga bisa timbul karena hal hal lain diluar kebijakan stabilisasi (Richard A Musgrave – Peggy B Musgrave, 1991 hal 491-492). Oleh karena itu dengan adanya laju inflasi atau prosentase perubahan tingkat harga maka dapat dikatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Disini pemerintah cenderung memutuskan untuk menyerap kenaikan output tanpa menaikkan pajak sehingga permintaan agregat meningkat (inflasi akibat permintaan / *Demand Pull Inflation*). Begitu pula dengan kenaikan biaya secara tiba - tiba jika didukung oleh perluasan pemerintahan, maka akan mendorong kenaikan harga dan selanjutnya mengakibatkan kenaikan upah (yang diperlukan untuk mengimbangi biaya atau disebut inflasi akibat biaya / *Cost Push Inflation*).

Inflasi atau invisible tax adalah cara lain untuk membiayai suatu pembangunan daerah. Inflasi diartikan sebagai keadaan dimana harga-harga umum meningkat secara terus menerus. Dengan kenaikan harga umum itu berarti bahwa semua unit ekonomi (konsumen maupun produsen) akan membeli barang dengan jumlah yang lebih sedikit tetapi dengan pengeluaran rupiah yang sama, oleh karena itu inflasi dapat diartikan sebagai pajak yang tidak tampak (invisible tax).

Laju wisatawan asing dan domestik akan berpengaruh pada penerimaan pajak daerah karena wisatawan merupakan subyek pajak

terutama dari hotel dan restoran yang melakukan pembayaran (PP no 65 / 2001) sehingga laju wisatawan berpengaruh positif terhadap pajak daerah.

Choudry (1979) dalam Sumarso SR (1998) menyatakan adanya dua kategori pertumbuhan pajak yang didasarkan atas penyebab utamanya. Pertumbuhan pajak yang pertama disebut dengan pertumbuhan otomatis. Penyebab utama pertumbuhan ini adalah peningkatan pendapatan perkapita karena peningkatan pendapatan perkapita akan menimbulkan wajib pajak baru oleh karena mereka yang dulunya belum dapat dikategorikan sebagai subyek pajak dengan meningkatnya pendapatan akan berubah menjadi subyek pajak, pertumbuhan pajak kedua disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan perpajakan , pertumbuhan ini disebut Pertumbuhan Diskresioner.

Pertumbuhan pajak yang terjadi harus selalu berkait dengan cara pengelolaan oleh pemerintah daerah, adapun tujuan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah adalah :

1. Ketanggungjawaban (*Accountability*)

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, dewan perwakilan rakyat daerah, kepala daerah (orang yang membawahi semua satuan tata usaha) dan masyarakat umum.

Adapun unsur – unsur penting tanggungjawab mencakup :

keabsahan , setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu.

Pengawasan, tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang, mencegah penghamburan dan penyelewengan, dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut, jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.

2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan

Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, jangka pendek dan jangka panjang (termasuk pinjaman jangka panjang).

3. Kejujuran.

Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur dan kesempatan untuk berbuat curang diperkecil.

4. Hasil guna (*Effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*)

Tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.

5. Pengendalian

Petugas keuangan pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut diatas tercapai, mereka harus mengusahakan agar selalu mendapat informasi yang diperlukan untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran serta

untuk membandingkan penerimaan dan pengeluaran dengan rencana dan sasaran

2.2. Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah

2.2.1 Peranan Pemerintah

Dalam sistem perekonomian apapun baik itu sistem kapitalis, sosialis maupun campuran, pemerintah selalu mempunyai peranan yang penting dalam proses pembangunan. Peranan pemerintah dalam sistem perekonomian sosialis memang sangat besar jika dibandingkan dengan perekonomian kapitalis.

Menurut Adam Smith, peranan pemerintah dibagi dalam tiga hal yaitu :

1. Pemerintah berfungsi untuk memelihara pertahanan dan keamanan dalam negeri
2. Pemerintah berfungsi untuk menyelenggarakan peradilan
3. Pemerintah berfungsi untuk menyediakan barang – barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya jalan dan sebagainya.

Sejalan dengan kemajuan jaman, maka peranan pemerintah diharapkan lebih besar lagi dalam mengatur kegiatan perekonomian karena sektor swasta tidak dapat mengatasi masalah perekonomian sendiri.

Dalam perekonomian modern peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar yaitu :

1. Peranan alokasi, yaitu peranan pemerintah dalam alokasi sumber-sumber ekonomi.
2. Peranan distribusi, yaitu pemerintah mengusahakan agar alokasi sumber – sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien, peranan lain pemerintah adalah sebagai alat distribusi pendapatan atau kekayaan.
3. Peranan stabilisasi yaitu untuk mempertahankan dan menyetabilkan kembali roda perekonomian jika terjadi shock.

Fungsi- fungsi pemerintah daerah :

1. Fungsi penyediaan pelayanan yang berorientasi lingkungan dan kemasyarakatan.

Pelayanan lingkungan meliputi : Jalan-jalan daerah, penerangan jalan, pembuangan sampah, saluran air limbah, pencegahan banjir, taman-taman dan rekreasi. Sedangkan pelayanan kemasyarakatan meliputi pendidikan , kesehatan masyarakat dan proyek – proyek jaminan sosial lainnya.

2. Fungsi pengaturan

Yaitu perumusan dan penegakan (*enforce*) peraturan – peraturan . Paling umum bagi pemerintah daerah adalah kekuasaannya mengatur kegiatan – kegiatan khusus misalnya tata guna tanah, standar bangunan, hiburan dan lain sebagainya.

3. Fungsi pembangunan.

Dalam fungsi pembangunan pemerintah kabupaten / kota terlibat langsung dalam bentuk- bentuk kegiatan ekonomi serta membantu dalam memobilisasi gerakan kemasyarakatan untuk peningkatan melek huruf dan pendidikan orang dewasa / mendorong proyek – proyek swadaya.

4. Fungsi perwakilan

Fungsi perwakilan dari pemerintah kabupaten / kota untuk menyatakan pendapatan daerah atas hal – hal diluar bidang tanggungjawab eksekutif. Fungsi ini sangat penting dalam penentuan bobot dan pengaruh pemerintah kabupaten / kota, namun peranan keuangannya yang langsung kecil

5. Fungsi koordinasi dan perencanaan.

Peran pemerintah kabupaten / kota yang terakhir terletak dalam pengkoordinasian dan perencanaan investasi dan tata guna tanah daerah. Di negara- negara dunia ketiga fungsi ini merupakan peran dari pemerintah kabupaten / kota yang berasas demokrasi. Fungsi ini meminta tanggung jawab yang besar bagi pelaksanaan program – program pembangunan utama yang dibiayai secara internasional oleh pemerintah pusat.

2.2.2. Teori perkembangan pengeluaran pemerintah

1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah.

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (1993) yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap – tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan atas :

- a. Tahap awal perkembangan ekonomi, prosentasi investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya.
- b. tahap menengah pembangunan ekonomi , investasi pemerintah tetap dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini investasi swasta sudah semakin besar. Pada tahap ini peranan pemerintah tetap besar karena peranan swasta semakin besar pula dan banyak menimbulkan kegagalan pasar sehingga pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang banyak dan kualitas yang lebih baik.

Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan investasi swasta dalam prosentase terhadap GNP (*Gross National Product*) semakin besar dan prosentase terhadap GNP akan semakin kecil.

Pada tingkat perkembangan ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah

beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran – pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan lain sebagainya.

2. Hukum Wagner.

Wagner mengemukakan suatu teori, mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam prosentase terhadap GNP . Hukum Wagner adalah dalam suatu perekonomian apabila dalam pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintahpun akan meningkat.

Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan , rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (Organic theory of the state) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

Formulasi Hukum Wagner adalah :

$$\frac{PkPP1}{PPK1} < \frac{PkPP2}{PPK2} < \dots < \frac{PkPPn}{PPKn}$$

Keterangan :

PkPP = Pengeluaran pemerintah perkapita

PPK = Pendapatan per kapita yaitu GDP / jumlah penduduk

1,2,...n = Jangka Waktu (tahun)

3. Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut.

Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga makin meningkat, oleh karena itu, dalam keadaan normal ,meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar begitu juga dengan pengeluaran pemerintah pajak semakin besar.

Apabila keadaan normal tidak terganggu misalnya karena adanya perang, maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Karena itu penerimaan pemerintah dari pajak juga meningkat dan pemerintah meningkatkan penerimaannya tersebut dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang.

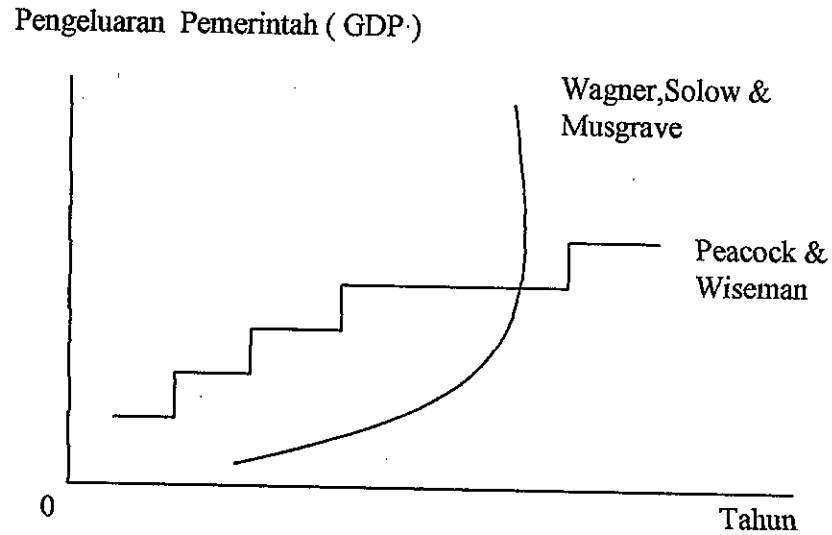
Keadaan ini disebut efek pengalihan (*displacement effect*) yaitu adanya suatu gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Perang tidak bisa dibiayai hanya dengan pajak, sehingga pemerintah juga harus meminjam dari negara lain untuk pembiayaan perang. Setelah perang selesai, sebetulnya pemerintah dapat menurunkan kembali tarif pajak pada tingkat sebelum adanya gangguan, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh karena pemerintah harus mengembalikan bunga pinjaman dan angsuran utang yang digunakan untuk membiayai perang sehingga pengeluaran pemerintah setelah perang selesai meningkat tidak hanya karena GNP naik, tetapi juga karena pengembalian hutang dan bunganya.

Selain itu, banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadi perang dan ini disebut efek inspeksi (*inspection effect*).

Adapun gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah sebagian kegiatan ekonomi yang tadinya dilaksanakan oleh swasta. Ini adalah apa yang dinamakan efek konsentrasi atau *concentration effect*.

Menurut Peacock dan Wiseman perkembangan pengeluaran pemerintah tidak berbentuk garis tetapi bebentuk seperti tangga seperti ditunjukkan pada gambar 1

Gambar 2.1
Kurva Perkembangan
Pengeluaran Pemerintah



2.2.3. Pendapatan Perkapita

Pendapatan masyarakat menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar pengeluarannya termasuk untuk membayar pajak. Semakin besar tingkat pendapatan perkapita masyarakat mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu wilayah dalam periode tertentu biasanya satu tahun, yang ditunjukkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu

wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. PDRB perkapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dengan satuan rupiah. Menghitung angka – angka PDRB dengan tiga pendekatan (Dumairy, 1999) yaitu :

1. Menurut pendekatan produksi berarti PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada disuatu wilayah / propinsi dalam suatu waktu tertentu.
2. Menurut pendekatan pendapatan berarti PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor – faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi suatu wilayah dalam waktu tertentu. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung netto.
3. Menurut pendekatan pengeluaran berarti PDRB adalah semua komponen pengeluaran akhir seperti :
 - a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba.

- b. Konsumsi pemerintah .
- c. Pembentukan modal tetap bruto.
- d. Perubahan stock.
- e. Ekspor netto dalam jangka waktu tertentu.

Ketiga konsep pendekatan tersebut memberikan jumlah yang sama antara jumlah pengeluaran dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor – faktor produksinya.

Pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran bagi kemakmuran suatu daerah pendapatan kapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya menimbulkan insentif bagi diubahnya struktur produksi (pada saat pendapatan meningkat ,permintaan akan barang barang manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat daripada permintaan akan produk – produk pertanian) (Todaro, 2000).

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi pendapatan per kapita riil suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintahnya. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah, semakin besar pula

potensi sumber penerimaan daerah tersebut sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar pajak juga meningkat.

Di Negara sedang berkembang, pendapatan perkapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya menimbulkan insentif bagi diubahnya struktur produksi (pada saat pendapatan meningkat, permintaan akan barang-barang manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat daripada permintaan akan produk-produk pertanian)

Tehnologi maju yang diperlukan untuk mencapai lonjakan output serta perubahan – perubahan struktural juga mengakibatkan berubahnya skala produksi dan karakteristik unit-unit badan usaha ekonomi, baik itu dalam aspek organisasi maupun lokasinya.

2.2.4.Jumlah Wisatawan

Pengertian wisatawan menurut *Economic Commission of League of Nation* tahun 1937 yang diterima sebagai batasan mengenai international tourist untuk keperluan pembuatan statistik wisatawan international adalah sebagai berikut (Spillane, 1997).

“ The term tourist shall, in principle, be interpreted to mean any person travelling for a period of 24 hours or more in a country other than the one in which he usually resides “

dalam perkembangannya batasan umum ini dianggap kurang tepat, sehingga kemudian komisi menganggap perlu menggempur maknanya dengan

mengkatagorikan orang – orang yang seharusnya atau tidak seharusnya dianggap sebagai wisatawan. yang bisa dianggap sebagai wisatawan :

- Mereka yang mengadakan perjalanan untuk kesenangan karena alasan keluarga, kesehatan, dan lain – lain.
- Mereka yang mengadakan perjalanan untuk pertemuan – pertemuan atau karena tugas – tugas tertentu (ilmu pengetahuan, tugas pemerintah , diplomasi, agama, olah raga) dan lain – lain.
- Mereka yang mengadakan perjalanan dengan tujuan usaha
- Mereka yang datang dalam rangka perjalanan dengan kapal laut walaupun tinggal disuatu negara kurang dari 24 jam.

Kegiatan – kegiatan wisatawan dapat merupakan gambaran praktis masuknya devisa melalui industri pariwisata sebagai berikut :

- Penerimaan *visa fee* sewaktu akan berangkat kenegara tujuan di kedutaan besar dan konsulat negara yang bersangkutan.
- Hasil penjualan tiket dari maskapai penerbangan (bila yang digunakan adalah maskapai penerbangan negara yang bersangkutan) untuk pulang dan pergi.
- Biaya taksi atau *coach bus* dari dan ke airport dan hotel.
- Sewa kamar hotel selama menginap pada beberapa kota yang dikunjungi.
- Pengeluaran wisatawan untuk makanan dan minuman pada bar dan restoran baik didalam maupun diluar hotel mereka menginap.

- Biaya *seightseeing* dan *excursion* atau *tours* pada kota-kota yang dikunjungi di daerah tujuan.
- Biaya taksi untuk transportasi lokal untuk keperluan pribadi dalam kota yang dikunjungi.
- Pengeluaran untuk membeli barang – barang souvenir serta barang – barang lainnya pada kota yang dikunjungi.
- Fee untuk perpanjangan visa ketempat atau kota yang dikunjungi (bila diperlukan).

Bilamana semua pengeluaran wisatawan, semenjak akan meninggalkan tempat asalnya sampai ditempat tujuan dan kembali ketempat asalnya semula maka seluruh pengeluaran yang dilakukan merupakan devisa yang diterima oleh negara – negara *tourist receiving countries* walaupun tidak seluruhnya. (Yoeti, 1996). Pengeluaran wisatawan selama dalam perjalanan wisata merupakan sumber penerimaan pajak daerah. Kebutuhan pariwisata merupakan kebutuhan yang memiliki ciri khusus dari kebutuhan lain, baik barang – barang maupun jasa – jasa lainnya. Perilaku wisatawan karena memiliki alasan – alasan khusus dalam hal pengeluaran untuk produk wisata, mereka berperilaku bagaikan orang kaya. Setidaknya pengeluaran mereka lebih besar daripada pengeluaran sehari – hari.

Pada umumnya orang – orang yang melakukan perjalanan wisata mempunyai tingkat sosial ekonomi yang tinggi. Mereka memiliki trend hidup dan waktu senggang, serta pendapatan (*income*) yang relatif besar, artinya

kebutuhan hidup minimum mereka sudah terpenuhi. Mereka mempunyai cukup uang untuk membiayai perjalanan wisata.

Selama dalam perjalanan, wisatawan membutuhkan berbagai macam keperluan, seperti : Penginapan, makanan dan minuman, transportasi, peninjauan obyek wisata, hiburan (*entertainment*), pembelian cinderamata (*souvenir*), dan keperluan – keperluan lain. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut wisatawan harus mengeluarkan uangnya sehingga akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak daerah.

Secara teoritis (*apriori*), semakin lama wisatawan tinggal disuatu daerah tujuan wisata, semakin banyak uang yang dibelanjakan didaerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit untuk keperluan makan, minum dan penginapan selama tinggal disitu.

Begitu pula dengan pariwisata, pariwisata di Jawa Tengah merupakan salah satu sektor andalan dimana makin besar jumlah wisatawan (baik domestik maupun mancanegara) maka diharapkan menyebabkan peningkatan pendapatan pajak daerah, baik melalui pajak hotel, restoran dan pajak hiburan, karena pada prinsipnya dalam industri pariwisata : hotel, restoran dan tempat – tempat hiburan adalah merupakan faktor yang sama.

Dalam perannya, pemerintah di bidang ekonomi melalui dua sisi yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Sisi penerimaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil BUMD, hasil kekayaan daerah dan lain-lain ; dana perimbangan yang terdiri dari bagian daerah dari

bagi hasil , dana alokasi umum , dana alokasi khusus , lain- lain pendapatan yang sah.

Sedangkan sisi pengeluaran terdiri dari Belanja Rutin , terdiri dari administrasi umum, operasi dan pemeliharaan dan prasarana umum; belanja investasi terdiri dari publik dan aparatur; pengeluaran transfer terdiri dari angsuran pinjaman dan bunga ,bantuan dana cadangan serta pengeluaran tak terduga.

2.2.5 Jumlah Hotel

Obyek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel termasuk :

- Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
- Pelayanan penunjang sebagai fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberi kemudahan atau kenyamanan.
- Fasilitas olah raga atau hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
- Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- Penjualan makanan dan minuman yang disertai fasilitas penyantapannya.

Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud diatas adalah :

- Persewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
- Pelayanan tinggal di asrama atau pondok pesantren.
- Fasilitas olah raga yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
- Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel.
- Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum
- Pelayanan usaha boga atau catering.

Untuk masalah tarif pajak hotel sebesar 10 % dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dengan kata lain pajak hotel adalah besarnya pungutan yang dikenakan ke mereka yang menginap dan telah menikmati segala fasilitas yang telah disediakan oleh penginapan tersebut, biasanya pajak yang dikenakan sebesar sepuluh persen.

Besarnya tarif pajak hotel yang tertuang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak hotel dan restaurant dipungut oleh daerah tempat hotel berlokasi. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

Perhotelan dilihat sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh kelompok maupun perorangan dalam waktu yang tidak tentu, digunakan sebagai sumber penerimaan daerah. Perhotelan memiliki peran sebagai motor penggerak (*leading sector*) pembangunan daerah, perlu dikembangkan

secara baik dan benar sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, pendapatan asli daerah, penyerapan tenaga kerja serta perluasan usaha.

Hotel merupakan salah satu jenis usaha yang menyiapkan pelayanan jasa bagi masyarakat dan wisatawan.

Menurut Suparmoko (1996 : 144) pajak Hotel dan Restoran merupakan pajak tidak langsung yang artinya :

- a. Menurut Tata Usaha Negara adalah pajak yang pemungutannya tidak dilakukan berdasarkan atas surat ketetapan pajak (kohir) dan pengenaannya tidak dilakukan secara berkala.
- b. Dalam arti ekonomis ialah pajak yang beban pajaknya dapat digantikan / dilimpahkan kepada orang lain.

2.2.6 Investasi Pemerintah Daerah

Pengeluaran pemerintah daerah untuk kegiatan pembangunan pada dasarnya merupakan investasi yang dilakukan pemerintah daerah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan ekonomi dan sosial yang ada di masyarakat.

Kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah daerah dan pusat dapat berupa pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial yang berada di daerah tersebut, maka investasi pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah realisasi pengeluaran pembangunan daerah juga merupakan faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Samuelson PA dan William D Nordhaus (1995), investasi (penanaman modal) adalah pembelian barang – barang modal yang meliputi penambahan stok modal atau barang modal di suatu negara, seperti bangunan, peralatan produksi dan barang- barang inventori dalam waktu satu tahun. Investasi merupakan tambahan stok barang modal tahan lama yang akan memperbesar peluang produksi di masa datang.

Dalam bukunya “*Economics Models, Techniques and Applications* “ Michael D Intriligator (1995) mengemukakan bahwa variabel- variabel yang mempengaruhi investasi adalah *National Income* (Y), *Capital Stock* (K) serta *Interest Rate* (r) , yang dirumuskan dalam suatu persamaan ekonometrik sebagai berikut :

$$C_t = y_1 Y_t + \beta_1 + \varepsilon_t^0$$

$$I_t = y_2 Y + \beta_2 Y_{t-1} + \beta_3 + \varepsilon_t^1$$

$$I_t = y_2 (Y_t - Y_{t-1}) + \beta_3 + \varepsilon_t^1$$

$$Y_t = C_t + I_t + G_t$$

Dimana Y_t adalah *national income* dalam tahun t , (t merupakan konsumsi dan I_t adalah investasi sedangkan G_t adalah pengeluaran pemerintah / government spending) dalam tahun t .

Salah satu factor penting yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah untuk pembangunan adalah jumlah pajak yang diramalkan. Dalam menyusun anggaran belanja pun pemerintah harus lebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterimanya. Maka

semakin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan makin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang dapat dilakukan (Sadono Sukirno, 1999).

Oleh karena itu hipotesis yang dapat dibangun adalah : investasi pemerintah daerah diduga berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di Jawa Tengah

2.2.7 Daya Listrik Tersambung

Pada jaman modern ini hampir seluruh kegiatan baik rumah tangga, industri, bisnis, sosial, kantor pemerintah dan penerangan jalan umum memanfaatkan energi listrik.

Hal ini terlihat dari tabel di bawah ini

Tabel 2.1
Daya Listrik Tersambung
Propinsi Jawa Tengah (1998 s/d 2001)

No	Pelanggan PLN	T a h u n							
		1998	r	1999	r	2000	r	2001	r
1	Rumah tangga	4499121	6,7%	4641234	3,16%	4800659	3,43%	4945573	3,02%
2	Industri	4405	5,94%	4352	-1,2%	4629	6,36%	4743	2,46%
3	Bisnis	117206	94,7%	135072	15,2%	144335	6,86%	152399	5,59%
4	Sosial	115545	101,6%	120060	3,91%	124450	3,66%	128237	3,04%
5	Kantor Pemerintah	13536	14,31%	13418	-0,9%	13084	-2,5%	13106	0,17%
6	P J U	6467	209,9%	6422	-0,7%	7258	13 %	8541	17,68%
	Total	4756280		1920558	3,45%	5094415	3,53%	5252598	3,11%

Sumber : Laporan akhir penyusunan buku data perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

Terlihat jelas sekali bahwa daya listrik yang tersambung selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sehingga sebagai sarana

produksi maka penyediaan listrik perlu ditingkatkan mengingat pertambahan jumlah penduduk yang terjadi akan mempengaruhi peningkatan pemanfaatannya. Selain itu pengelolaan agar mutu baik juga perlu dilakukan sekaligus harga yang terjangkau karena semua itu akan sangat berpengaruh dalam penerimaan pajak daerah.

Sebagai contoh nyata adalah strategi listrik di pedesaan yang merupakan wujud dari intensifikasi dan pemanfaatan jaringan yang sudah ada, dan sudah dilaksanakannya pelayanan di pedesaan (rural business service) guna meningkatkan pemakaian listrik yang produktif di pedesaan.

Untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak maka kebijakan atau stimulus yang diambil melalui anggaran pembangunan dengan fokus sarana infrastruktur maupun peningkatan pelayanan pada masyarakat. Semakin baik sarana infrastruktur dan pelayanan maka akan menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pajak semakin tinggi sehingga dengan adanya pengeluaran yang tinggi maka penerimaan pajakpun meningkat.

Adapun salah satu fasilitas pajak infrastruktur yang dipilih oleh masyarakat adalah listrik, dalam UU No 25 tahun 1999 tentang pajak penerangan jalan dapat dilihat bahwa semakin besar penggunaan energi listrik maka pajak daerah yang dapat dipungut pun semakin besar.

2.3 Penelitian Terdahulu

Alfian Lains (1985), dalam kajian terhadap data historis tentang pendapatan daerah dalam ekonomi orde baru diperoleh temuan bahwa

relatif rendahnya penerimaan pajak daerah dan pajak sentral di Indonesia erat kaitannya dengan pendapatan masyarakat yang masih rendah. Data yang digunakan adalah data keuangan daerah di Indonesia periode 1973/1974 – 1980/1981

Ahmad Jamli dan Astuti Rahayu (1997) dalam studinya “ Analisis Pajak Pembangunan I Perhotelan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kotamadya Yogyakarta) melakukan peramalan penerimaan PP-I Perhotelan untuk jangka waktu 5 tahun yang akan datang, dengan alat analisis eksponensial. Trend eksponensial yang diperoleh adalah $Y=446,307 \cdot 813,4 (1,17191493)^x$. Kesimpulannya adalah bahwa penerimaan PP-I Perhotelan untuk 5 tahun yang akan datang selalu mengalami kenaikan yang semakin tinggi, dan hal ini menggambarkan prospek penerimaan pajak yang makin baik pada tahun – tahun yang akan datang. Menurut Ahmad Jamli dan Astuti Rahayu (1997) penerimaan di sektor pajak daerah juga dipengaruhi jumlah hotel dan restoran. Jumlah hotel disini tidak secara langsung berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena subyeknya adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran terhadap hotel dan wajib pajaknya pengusaha hotel , dapat dikatakan sebagai subyek adalah konsumen hotel termasuk wisatawan dan obyeknya adalah jumlah hotel sehingga bila dilihat dari wajib pajaknya maka jumlah hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah.

Agus Wantara (1997) melakukan analisis Pendapatan Asli Daerah dan bantuan pemerintah pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Model yang

digunakan untuk menganalisis pajak daerah : $PD = F (II , YK , KG , W)$
 dimana PD = Pajak Daerah , II = Inflasi, YK = PDRB Perkapita, KG =
 Jumlah Kendaraan bermotor dan W = Jumlah wisatawan domestik dan asing.

Kesimpulan :

- Jumlah kendaraan bermotor mempunyai pengaruh yang signifikan pada $\alpha 1 \%$
- Jumlah wisatawan berpengaruh secara signifikan pada $\alpha 5 \%$
- Inflasi dan pendapatan perkapita tidak signifikan pada $\alpha 5 \%$

Sumarso Sr (1998), meneliti dampak reformasi perpajakan tahun 1984 terhadap efisiensi sistem perpajakan Indonesia. Terdapat beberapa model untuk mengukur efisiensi sistem pemajakan, yaitu : Model tingkat pemajakan, Model kapasitas pemajakan, Model elastisitas pemajakan, model optimasi pemajakan, dan model keseimbangan umum pemajakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model ekonometrika simultan dan peningkatan sistem pemajakan di Indonesia dihitung menggunakan variabel dummy. Analisa non statistik dibuat untuk mendukung evaluasi secara statistik.

Jaka Sriyana (1999), meneliti hubungan keuangan pusat- daerah, reformasi perpajakan dan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah dengan menganalisis faktor – faktor yang berpengaruh terhadap pajak daerah. Faktor yang dianalisis adalah Pendapatan perkapita dan Jumlah penduduk, data yang digunakan adalah data dari 27 propinsi tahun 1995. Dalam studinya tersebut diperoleh kesimpulan : Pendapatan per kapita dan

jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 % dan koefisien determinasi sebesar 51%.

Nawang Astaning Widhiastuti. (2000), melakukan analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur tahun 1987 – 1998. Faktor yang dianalisis adalah PDRB per kapita, jumlah kendaraan bermotor , dan jumlah wisatawan. Faktor – faktor dalam penelitian adalah faktor yang mempunyai korelasi yang tinggi dengan PAD. Sampel mencakup data 12 tahun (1987-1998) yang diperoleh dari Balai Pusat Statistik Surabaya. Uji Statistik menunjukkan bahwa variabel bebas PDRB, Jumlah kendaraan bermotor dan jumlah wisatawan berpengaruh secara signifikan terhadap PAD.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu pada variabel yang mempengaruhi yaitu Penerimaan Pajak Daerah (R) yaitu : Pendapatan Perkapita (PP), Jumlah Wisatawan (W), Jumlah Hotel (H), Investasi Pemerintah Daerah (IG), dan Daya Listrik tersambung (DL), dan kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 1998-2001. Persamaannya adalah menyoroti unsur pajak dalam PAD .

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	VARIABEL	KESIMPULAN
1	Alfian Lains (1985)	Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penduduk - Luas daerah - Usaha perpajakan di daerah - Pendapatan regional per kapita 	<ul style="list-style-type: none"> - Subsidi pemerintah pusat sangat dominan sebagai sumber pendapatan daerah selama pemerintahan orde baru, tetapi pemberian subsidi pembangunan dalam bentuk subsidi umum telah disinyalir sebagai suatu yang kurang layak. - Untuk meningkatkan PAD diusulkan menyerahkan bagian tertentu dari pendapatan pajak negara yang dipungut di suatu daerah kepada daerah yang bersangkutan dan dilakukan reformasi melimpah dan beberapa pajak sentral menjadi pajak daerah
2	Ahmad Jamli dan Astuti Rahayu (1997)	Analisis Pajak Pembangunan I Perhotelan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi PP I perhotelan seluruh hotel di Kodya Yogyakarta - Tarif kamar, merupakan tarif rata-rata hotel berbintang dan melati - Jumlah seluruh 	Peramalan penerimaan PP I perhotelan untuk 5 tahun yang akan datang selalu mengalami kenaikan yang semakin tinggi dan ini menggambarkan prospek penerimaan pajak yang

			<p>kamar hotel ber bintang dan melati</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah hari dalam 1 tahun di hitung 365 hari - Tarif pajak = 10% 	<p>menggembirakan di tahun – tahun yang akan datang.</p>
3	Agus Wantara (1997)	<p>Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Bantuan Pemerintah Pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta (1970-1992)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber sumber nyata Pemerintah daerah : <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan pajak sentral per kapita di propinsi • Persentase peningkatan penghasilan tahunan dari pajak • Persentase peningkatan penghasilan tahunan dari ekspor • <i>Tax effort</i> • <i>Taxable capacity</i> - Penduduk <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penduduk • Persentase pertambahan penduduk - Upah Sektor umum yang di setujui Depdagri - Jumlah jalan propinsi - Hektar Tanah yang sudah diairi 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah wisatawan berdampak langsung terhadap peningkatan PAD. - Adanya perubahan pendapatan regional perkapita akan berdampak langsung terhadap investasi swasta di DIY dan pendapatan tersebut akan mempunyai dampak penggandaan (<i>multiplier</i>) terhadap besarnya bantuan dari pemerintah pusat - Prasarana jalan mempunyai dampak langsung terhadap investasi swasta di DIY - Perubahan suku bunga tidak berdampak langsung secara signifikan terhadap variasi perubahan besarnya investasi swasta di DIY. - Peningkatan jumlah ranmor berdampak langsung terhadap peningkatan PAD dengan <i>multiplier</i> sebesar 0,023787

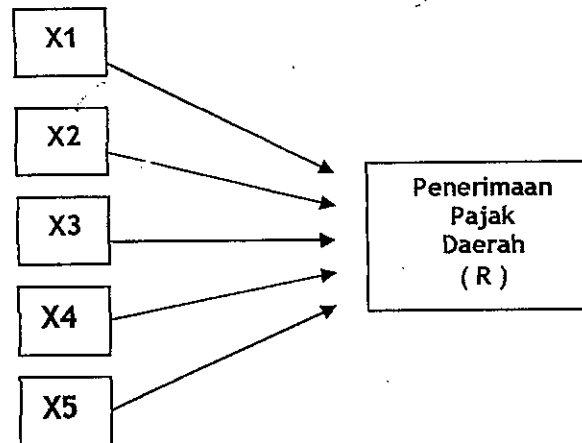
4	Soemarso SR (1998)	Dampak Reformasi Perpajakan 1984 Terhadap Efisiensi Sistem Perpajakan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Produk Domestik Bruto (PDB) - Ekspor - Impor - Likuiditas - Perekonomian - Pajak : PPH, PPN, dan total penerimaan pajak 	<ul style="list-style-type: none"> - Reformasi pajak tidak berpengaruh terhadap pengumpulan pajak penghasilan yang berarti bahwa pertumbuhan pajak ini secara mendasar benar-benar pertumbuhan otomatis daripada karena kebijakan. - Pertumbuhan pajak penghasilan tidak mempunyai hubungan dengan pertumbuhan GDP dan 2 tahun kelambatan investasi. - Pajak Pertambahan Nilai tumbuh secara negatif bila dihubungkan dengan pertumbuhan impor dan tidak mempunyai hubungan dengan pertumbuhan GDP
5	Jaka Sriyana (1999)	Hubungan Keuangan Pusat- Daerah, Reformasi Perpajakan Dan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan perkapita - Jumlah Penduduk - Kebijakan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel pendapatan perkapita dan jumlah penduduk merupakan variabel yang cukup penting menentukan PAD dan pajak baik TK I maupun Tk II dengan demikian peningkatan PAD dan pajak masing-masing daerah di Indonesia selain disebabkan adanya kebijakan reformasi

				perpajakan juga ditentukan oleh peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dan jumlah penduduk khususnya penduduk yang bekerja
6	Nawang Astaning Widhiastuti (2000)	Analisis faktor -- faktor yang mempengaruhi pendapatan Asli Daerah Jawa Timur tahun 1987-1998	<ul style="list-style-type: none"> - PDRB perkapita - Jumlah mobil dan sepeda motor - Jumlah wisatawan 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel bebas PDRB, jumlah mobil dan sepeda motor dan jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan regional, dengan demikian pemerintah daerah harus menindaklanjuti dengan memperluas aktivitas mereka.

2.4. Kerangka Pemikiran

Selanjutnya mengacu pada teori perpajakan Musgrave and Musgrave, dan Choudry di atas, maka dalam penelitian ini menggunakan variabel – variabel yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah (R) yaitu : Pendapatan Perkapita (PP), Jumlah Wisatawan (W) , Jumlah Hotel (H), Investasi Pemerintah Daerah (IG), dan Daya Listrik tersambung (DL).

Gambar 2.2
Kerangka pemikiran Teoritis



Keterangan

- X1 = Pendapatan perkapita (PP)
 X2 = Jumlah Wisatawan (W)
 X3 = Jumlah Hotel (H)
 X4 = Investasi Pemerintah Daerah (IG)
 X5 = Daya Listrik tersambung (DL)

2.5. Hipotesis

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara atau preposisi tentang hubungan antara dua variabel atau lebih (Singarimbun & Effendi, 1987). Untuk dapat mengarahkan hasil penelitian, disampaikan suatu hipotesis penelitian, sebagai berikut :

Hipotesis 1 = Diduga Pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah.

Hipotesis 2 = Diduga Jumlah Wisatawan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah.

- Hipotesis 3 = Diduga Jumlah Hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah.
- Hipotesis 4 = Diduga Investasi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah.
- Hipotesis 5 = Diduga Daya Listrik tersambung berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah .

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini merupakan data pooling, atau gabungan dari data silang tempat (*cross section*) seluruh kabupaten / kota di Jawa Tengah dan data runtut waktu (*time series*) dari tahun 1998 s/d 2001 (4 tahun), sehingga dihasilkan data sebanyak 140 dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder

Data Pooling adalah kombinasi antara data runtut waktu (*time series*) yang memiliki observasi temporal biasa pada suatu unit analisis dengan data silang tempat (*cross section*) yang memiliki observasi-observasi pada suatu waktu tertentu .

Adapun alasan digunakannya data pooling karena pertama penggunaan data pooling akan meningkatkan jumlah observasi (sampel) sehingga mengatasi masalah keterbatasan jumlah data runtut waktu (*time series*) , yang umumnya dijumpai untuk penelitian bisnis , pasar modal, perusahaan akuntansi dan regional . Yang kedua dengan data pooling akan diperoleh variasi antar unit yang berbeda menurut ruangan dan variasi yang muncul menurut waktu.

Dengan demikian analisis dengan pooling memungkinkan untuk menguraikan , menganalisis , dan menguji hipotesis baik hasil maupun prosesnya (Mudrajad, 2001).

3.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengumpulan data melalui dokumentasi, bahan-bahan laporan instansi serta sumber-sumber lain yang digunakan sebagai bahan analisis seperti BPS, Dipenda, Biro Perekonomian Propinsi Jawa Tengah., Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Tengah.

3.3. Definisi Operasional Variabel.

1. Penerimaan Pajak Daerah (R) adalah realisasi penerimaan pajak daerah tahunan kabupaten/kota atas dasar harga berlaku di Propinsi Jawa Tengah tahun 1998 – 2001. Data penerimaan pajak daerah dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinyatakan dalam satuan Rupiah
2. Pendapatan Perkapita (PP) adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) seluruh Kabupaten / kota di Propinsi Jateng tahun 1998 - 2001 atas dasar harga konstan tahun 1993. Data pendapatan per kapita dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinyatakan dalam satuan Rupiah.
3. Jumlah Wisatawan (W) adalah jumlah wisatawan domestik/asing yang menginap di hotel berbintang dan hotel melati di kabupaten / kota di Propinsi Jateng tahun 1998 - 2001. data diambil dari Statistik Arus Wisatawan Propinsi Jawa Tengah yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Tengah, dinyatakan dalam satuan orang.

4. Jumlah Hotel (H) adalah jumlah Hotel berbintang dan hotel melati pada tahun 1998 – 2001 di kabupaten / kota Propinsi Jateng. Data diambil dari buku “Jawa Tengah Dalam Angka” yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Tengah. Data tersebut dinyatakan dalam unit
5. Investasi Pemerintah Daerah (IG) adalah besarnya pengeluaran anggaran pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten /Kota tahun 1998 – 2001. Data tersebut diperoleh dari ringkasan APBD Kabupaten / Kota di Jawa Tengah yang disusun oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah. Besarnya pengeluaran anggaran pembangunan pemerintah daerah dinyatakan dalam satuan jutaan rupiah (Rp)
6. Daya Listrik (DL) adalah besarnya daya listrik tersambung yang terjual oleh PT PLN Distribusi Jawa Tengah tahun 1998 – 2001. data tersebut diambil dari buku “Jawa Tengah Dalam Angka” yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Tengah. Data tersebut dinyatakan dalam satuan Kilo Volt Ampere (KVA)

3.4. Metode Analisis

3.4.1. Model Analisis

Alat analisis yang dipergunakan adalah analisis regresi berganda yang diestimasi dengan metode kuadrat terkecil biasa (*OLS-Ordinary Least Squares*), dengan pertimbangan metode ini mempunyai sifat-sifat yang dapat

diunggulkan, yaitu secara teknis sangat kuat, mudah dalam penarikan interpretasi dan perhitungannya, serta sifat penaksir yang BLUE (Gujarati,1995 : 545). Penggunaan regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, sekaligus untuk mengetahui besaran dan arah tanda variabel-variabel bebas.

Model yang digunakan untuk mengestimasi fungsi penerimaan pajak sebagai berikut :

$$\text{Penerimaan Pajak Daerah (R)} = f (\text{PP, W, H, IG, DL}) \dots \dots \dots (1)$$

Penerimaan Pajak Daerah diasumsikan sebagai fungsi produksi sehingga secara matematis fungsi penerimaan pajak dapat ditulis sebagai berikut :

$$R = \alpha \text{PP}^{\alpha_1} \cdot \text{W}^{\alpha_2} \cdot \text{H}^{\alpha_3} \cdot \text{IG}^{\alpha_4} \cdot \text{DL}^{\alpha_5} \dots \dots \dots (2)$$

Agar model tersebut dapat ditaksir hasilnya maka dari model dasar penelitian kemudian ditransform dalam bentuk logaritma guna dapat diketahui nilai elastisitas dari variabel independennya sehingga model ekonometrikanya menjadi :

$$\begin{aligned} \text{Log R} &= \alpha_0 + \alpha_1 \log \text{PP} + \alpha_2 \log \text{W} + \alpha_3 \log \text{H} + \alpha_4 \log \text{IG} + \alpha_5 \log \text{DL} + \epsilon_t \\ &= -0,476 + 0,324 \text{PP} + 0,101 \text{W} + 0,069 \text{H} + 0,397 \text{IG} + 0,664 \text{DL} + \\ &\quad \epsilon_t \dots \dots \dots (3) \end{aligned}$$

Keterangan :

α_0 = intersept

$\alpha_1 \dots \alpha_5$ = koefisien regresi masing-masing variabel penjelas terhadap Penerimaan Pajak

ε_t	=	error sampling
PP	=	Pendapatan Perkapita
W	=	Jumlah Wisatawan
H	=	Jumlah Hotel
IG	=	Investasi Pemerintah Daerah
DL	=	Daya Listrik Tersambung

3.4.2. Alat Analisis

Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Uji ekonometri merupakan pengujian terhadap validitas asumsi klasik, dengan tujuan untuk mendapatkan model yang memenuhi sifat *best*, *linier*, *unbiased* dan *estimator*. Untuk itu uji yang dilakukan meliputi uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji multikolinearitas.
2. Uji Apriori ekonomi, uji ini berkaitan dengan masalah tanda dan intensitas hubungan antar variabel terikat dan variabel bebas yang diteliti, dibandingkan dengan hipotesis yang disusun;
3. Uji statistik, dilakukan untuk menganalisis parameter yang diestimasi dengan menggunakan uji-t (untuk uji statistik secara individu), dan uji-F (untuk pengujian variabel penjelas secara serempak / bersama-sama);
4. Uji ketepatan perkiraan dilakukan dengan melihat nilai determinasi yang besarnya antara lain $0 < R^2 < 1$. Semakin dekat nilainya dengan 1, maka keeratan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen semakin baik (*goodness of fit*).

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Keadaan Wilayah

Propinsi Jawa Tengah sebagai salah satu propinsi di Indonesia letaknya diapit oleh tiga propinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Yogyakarta. Batas geografis Propinsi Jawa Tengah adalah Propinsi Jawa Barat disebelah barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Indonesia dibagian selatan, Propinsi Jawa Timur dibagian timur dan Laut Jawa dibagian utara. Secara astronomi Jawa tengah terletak antara $5^{\circ} 40'$ hingga $8^{\circ} 30'$ Lintang Selatan dan antara $108^{\circ}30'$ dan $111^{\circ}30'$ Bujur Timur (termasuk pulau karimunjawa) jarak terjauh dari barat ketimur adalah 263 km dan dari utara ke selatan sepanjang 226 km tidak termasuk pulau karimunjawa.

Luas Jawa Tengah terdiri dari 1.008 ribu ha atau 30,99 persen merupakan tanah sawah dan 2.246 ribu ha atau 69,01 persen merupakan tanah kering dimana terjadi penurunan luas tanah sawah setiap tahunnya. Secara administratif terbagi dalam 29 kabupaten dan 6 kota, yang terdiri dari 533 kecamatan, meliputi 8539 desa/kelurahan. Sebagian desa yang ada merupakan desa swasembada . luas Propinsi Jawa Tengah tercatat 3,25 juta ha atau sekitar 1,7 persen dari luas Indonesia atau 25,04 persen dari luas pulau jawa. Propinsi Jawa Tengah memiliki kabupaten paling luas yaitu Kabupaten Cilacap Seluas 213.851 ha atau 6,57 persen dari luas seluruh Propinsi, sedangkan Kabupaten tersempit adalah Kabupaten Kudus dengan

luas wilayah 45.512 ha atau 7,37 persen dari luas Jawa Tengah kota paling luas adalah Kota Semarang dengan luas 37.367 ha atau 7,75 persen luas Propinsi, sedangkan kota paling sempit adalah Kota Magelang seluas 7.872 ha atau 0,06 persen dari luas Propinsi Jawa Tengah. Luas hutan di Jawa Tengah menurut Perum Perhutani seluas 646.831,93 ha atau sekitar 28,80 persen dari luas Wilayah Jawa Tengah Hutan seluas itu terdiri atas hutan lindung seluas 41.739,12 ha hutan produksi seluas 604.225,59 ha dan hutan suaka alam dan hutan wisata seluas 867,12 ha.

Terdapat empat tipe iklim di Jawa Tengah (Direktorat Bina Program Kehutanan) yaitu iklim tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. iklim tipe A memiliki sifat satu bulan kering dan minimum tujuh bulan basah. Wilayah yang bertipe iklim A adalah perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Barat, sekitar pulau Nusakambangan dan di sekitar Gunung Slamet. Iklim tipe B memiliki sifat satu sampai dua bulan kering dan tiga sampai sepuluh bulan basah, tersebar sekitar daerah Cilacap hingga Ungaran. Sifat iklim tipe C yakni satu sampai empat bulan kering dan sembilan bulan basah, tersebar hampir diseluruh wilayah Propinsi Jawa Tengah. Iklim tipe D memiliki sifat satu sampai enam bulan kering dan satu sampai tujuh bulan basah, tersebar di pantai utara bagian barat dan timur serta daerah bengawan solo hulu. Iklim tersebut berpengaruh pada penerimaan daerah terutama bila dilihat dari jumlah wisatawan.

4.2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang besar menjamin tersedianya tenaga kerja bagi pembangunan, namun membawa konsekuensi yang beragam, seperti menyempitnya lahan pertanian karena tekanan penduduk sementara itu diperlukan penyediaan bahan makanan yang cukup, kemudian muncul urbanisasi besar-besaran ke kota yang diikuti dengan kepadatan kota, kekumuhan, pengangguran, kejahatan dan masalah-masalah lain yang mengiringinya termasuk masalah ketenagakerjaan.

Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang cukup padat penduduknya. Menurut BPS, penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berusia 10 tahun ke atas, dan dapat dibedakan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu angkatan kerja yang sedang bekerja dan angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja yang sedang bekerja merupakan jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu.

Jumlah angkatan kerja rata-rata menurut kabupaten / kota di Jawa Tengah yang termasuk lima besar adalah Kabupaten Brebes sebesar 777.311 orang disusul Kabupaten Cilacap sebesar 651.135 orang, lalu Kabupaten Banyumas sebesar 613.501 orang serta Kota Semarang sebesar 587.910 orang. Besarnya jumlah penduduk terutama angkatan kerjanya di Jawa Tengah per kabupaten / kota dari tahun 1998 – 2001 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk berumur 10 tahun ke atas
yang termasuk angkatan kerja yang sedang bekerja (dalam orang)

No	Kab/Kota	1998	1999	2000	2001	Rata-rata
1	Cilacap	586.747	664.419	663.265	690.108	651.135
2	Banyumas	591.228	643.269	640.565	658.244	633.327
3	Purbalingga	358.186	362.887	345.543	366.709	358.331
4	Banjarnegara	380.702	396.587	397.997	420.252	398.885
5	Kebumen	522.016	526.403	524.974	521.730	523.781
6	Purworejo	328.323	337.762	324.559	343.721	333.591
7	Wonosobo	357.261	352.334	384.870	393.561	372.007
8	Magelang	535.337	556.105	584.440	561.769	559.413
9	Boyolali	454.241	475.431	494.343	505.872	482.472
10	Klaten	538.502	542.069	534.606	588.210	550.847
11	Sukoharjo	337.994	353.705	362.908	408.720	365.832
12	Wonogiri	527.786	529.858	517.904	559.170	533.680
13	Karanganyar	395.595	395.400	391.678	403.931	396.651
14	Sragen	429.698	445.072	433.503	427.665	433.985
15	Grobogan	590.868	599.961	603.932	659.244	613.501
16	Blora	443.105	444.898	433.706	414.768	434.119
17	Rembang	271.077	276.347	261.580	284.634	273.410
18	Pati	546.554	552.720	564.842	587.974	563.023
19	Kudus	331.554	350.908	364.314	362.180	352.239
20	Jepara	434.462	449.849	461.265	471.412	454.247
21	Demak	407.170	425.838	430.195	465.984	432.297
22	Semarang	441.776	428.676	413.223	446.121	432.449
23	Temanggung	336.437	358.358	356.855	368.967	355.154
24	Kendal	381.379	391.814	364.453	390.640	382.072
25	Batang	300.834	295.511	314.151	301.669	303.041
26	Pekalongan	336.270	322.777	355.845	400.700	353.898
27	Pemalang	477.288	510.524	520.240	569.603	519.414
28	Tegal	515.570	528.108	576.657	603.239	555.894
29	Brebes	780.325	787.205	764.195	777.520	777.311
30	Kota Magelang	52.800	51.324	47.886	49.000	50.253
31	Kota Surakarta	228.960	244.125	213.492	215.343	225.480
32	Kota Salatiga	42.750	42.253	63.426	66.028	53.614
33	Kota Semarang	576.015	617.778	583.896	573.949	587.910
34	Kota Pekalongan	151.571	166.308	105.300	109.540	133.180
35	Kota Tegal	127.447	139.536	90.614	98.365	113.991
	jumlah	14.117.828	14.566.119	14.491.222	15.066.542	14.560.428
	rata-rata	403.367	416.175	414.035	430.473	416.012

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka, beberapa tahun.

4.3. Pendapatan per Kapita

Tingginya laju pertumbuhan pendapatan per kapita yang dicapai adalah hasil dari cepatnya kenaikan produktivitas tenaga kerja. Sementara itu pendapatan per kapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi per kapita.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah / propinsi dalam periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

PDRB per kapita adalah ukuran indikator ekonomi yang didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun

PDRB per kapita merupakan salah satu ukuran dari tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Besarnya nilai rata-rata PDRB per kapita kabupaten / kota di Jawa tengah dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.2
PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
ADHK 1993 Tahun 1998-2001 (Dalam juta rupiah)

No	Kab/Kota	1998	1999	2000	2001	Rata-rata
1	Cilacap	1,253	1,275	1,329	1,360	1,304
2	Banyumas	0,677	0,675	0,696	0,697	0,686
3	Purbalingga	0,722	0,722	0,732	0,746	0,731
4	BanjarNEGARA	0,989	0,990	0,993	0,983	0,989
5	Kebumen	0,682	0,704	0,772	0,781	0,735
6	Purworejo	0,864	0,880	0,898	0,924	0,891
7	Wonosobo	0,664	0,683	0,701	0,712	0,690
8	Magelang	0,934	0,938	0,959	0,989	0,955
9	Boyolali	0,961	0,967	0,981	1,011	0,980
10	Klaten	0,923	0,933	0,956	0,989	0,950
11	Sukoharjo	1,390	1,392	1,426	1,465	1,418
12	Wonogiri	0,680	0,689	0,707	0,722	0,700
13	Karanganyar	1,439	1,465	1,515	1,505	1,481
14	Sragen	0,753	0,765	0,825	0,840	0,796
15	Grobogan	0,541	0,517	0,540	0,557	0,539
16	Blora	0,802	0,805	0,820	0,839	0,817
17	Rembang	0,848	0,866	0,905	0,931	0,888
18	Pati	0,803	0,811	0,807	0,824	0,811
19	Kudus	4,502	4,480	4,388	4,481	4,463
20	Jepara	1,081	1,080	1,021	1,054	1,059
21	Demak	0,780	0,779	0,767	0,776	0,775
22	Semarang	1,258	1,271	1,257	1,294	1,270
23	Temanggung	1,016	1,032	1,064	1,100	1,053
24	Kendal	1,734	1,756	1,772	1,810	1,768
25	Batang	1,085	1,102	1,092	1,108	1,097
26	Pekalongan	1,069	1,094	1,093	1,116	1,093
27	Pemalang	0,828	0,838	0,863	0,885	0,854
28	Tegal	0,638	0,652	0,661	0,685	0,659
29	Brebes	0,803	0,836	0,842	0,848	0,832
30	Kota Magelang	2,556	2,655	2,762	2,832	2,701
31	Kota Surakarta	2,281	2,296	2,375	2,454	2,352
32	Kota Salatiga	1,672	1,697	1,757	1,817	1,736
33	Kota Semarang	3,742	3,824	3,960	4,089	3,904
34	Kota Pekalongan	1,641	1,702	1,663	1,729	1,684
35	Kota Tegal	1,427	1,457	1,515	1,569	1,492
	Jumlah	44,036	44,629	45,414	46,522	45,150
	Rata-rata	1,258	1,275	1,298	1,329	1,290

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka, beberapa tahun

Berdasarkan Tabel 4.2 tersebut dapat diketahui bahwa lima besar kabupaten / kota yang memiliki rata-rata PDRB per kapita tertinggi selama tahun 1998 – 2001 berturut – turut adalah :

Kabupaten Kudus sebesar 4,463 juta rupiah / kapita / tahun,

Kota Semarang sebesar 3,904 juta rupiah / kapita / tahun,

Kota Magelang sebesar 2,701 juta rupiah / kapita / tahun,

Kota Surakarta sebesar 2,352 juta rupiah / kapita / tahun,

Kabupaten Kendal sebesar 1,768 juta rupiah / kapita / tahun.

Sedangkan lima kabupaten / kota dengan rata-rata PDRB per kapita terendah adalah Kabupaten Grobogan sebesar 0,539 juta rupiah / kapita / tahun , Kabupaten Tegal sebesar 0,659 juta rupiah / kapita / tahun, Kabupaten Banyumas sebesar 0,686 juta rupiah / kapita / tahun, Kabupaten Wonosobo sebesar 0,690 juta rupiah / kapita / tahun dan Kabupaten Purbalingga sebesar 0,739 juta rupiah / kapita / tahun.

4.4. Jumlah Wisatawan

Dalam beberapa dekade terakhir, kecenderungan pasar wisatawan baik domestik maupun wisatawan asing / internasional ditandai dengan tumbuhnya kelompok pasar baru yaitu pasar wisata minat khusus yang memiliki motivasi perjalanan khusus untuk terjun atau terlibat secara aktif dan intensif dalam berbagai aktivitas petualangan alam, interaksi yang mendalam terhadap komunitas untuk mempelajari budaya dan berbagai keunikan lokal.

Kegiatan wisata tersebut dilakukan sebagai bagian dari motivasi untuk pengkayaan wawasan, pengembangan diri dan petualangan (*adventure*) serta untuk tujuan aktualisasi diri melalui keterlibatan dalam berbagai aktivitas.

Seiring dengan prospek yang cerah industri pariwisata dunia, saat ini hampir setiap Negara berlomba-lomba untuk membangun sektor kapariwisataannya dan menarik pasar wisatawan dunia sebanyak mungkin untuk menyumbang devisa bagi negaranya.

Banyaknya jumlah pengunjung obyek wisata di Jawa Tengah sebagian besar adalah wisatawan domestik dan wisatawan asing /mancanegara yang berkunjung di Jawa Tengah masih relatif kecil jika dibandingkan dengan tiga daerah tujuan wisata yang lain yaitu Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jakarta. Banyaknya wisatawan manca negara dan wisatawan nusantara yang berkunjung di Jawa Tengah dapat diketahui sebagai berikut :

Tabel 4.3
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara
Di Propinsi Jawa tengah TH 1998-2001

Tahun	Wisman (dalam orang)	Pertumbuhan (%)	Wisnus (dalam orang)	Pertumbuhan (%)
1998	274.233	-134,9	11.907.513	-19,5
1999	219.470	-20	12.976.253	13,8
2000	270.945	23,5	14.569.739	12,3
2001	287.171	6	16.477.590	26,82

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka, diolah

Bila dilihat secara keseluruhan , jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara pada tiap kabupaten / kota dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4
Jumlah Wisatawan menurut kabupaten / kota
Di Propinsi Jawa tengah tahun 1998-2001 (dalam orang)

No	Kab/Kota	1998	1999	2000	2001	rata-rata
1	Cilacap	424136	433769	628214	516278	500599,3
2	Banyumas	539397	718470	892803	818154	742206
3	Purbalingga	111124	108247	143168	122020	121139,8
4	Banjarnegara	374376	472374	554527	449353	462657,5
5	Kebumen	429727	482715	523176	567268	500721,5
6	Purworejo	180252	202018	152365	57602	148059,3
7	Wonosobo	135847	73147	142356	136440	121947,5
8	Magelang	1544288	2004227	2857389	2744187	2287523
9	Boyolali	423764	96596	127192	195852	210851
10	Klaten	874851	1066058	1407502	1577892	1231576
11	Sukoharjo	157300	35901	34907	29363	64367,75
12	Wonogiri	216877	285856	338023	240252	270252
13	Karanganyar	509735	491697	144619	636145	445549
14	Sragen	157300	129008	166298	164269	154218,8
15	Grobogan	173633	141144	152468	129150	149098,8
16	Blora	133796	6660	28906	32817	50544,75
17	Rembang	171299	146401	168285	263139	187281
18	Pati	17356	12125	3606	4980	9516,75
19	Kudus	565693	762925	653107	856178	709475,8
20	Jejara	643241	374778	427320	447894	473308,3
21	Demak	1110164	1778746	2024523	2036290	1737431
22	Semarang	328599	296778	287926	428221	335381
23	Temanggung	52985	49162	58181	55798	54031,5
24	Kendal	133796	120087	159232	96420	127383,8
25	Batang	89118	85304	82968	104048	90359,5
26	Pekalongan	46461	31045	39729	34115	37837,5
27	Pemalang	199055	178672	134777	23850	134088,5
28	Tegal	388547	392890	561589	504270	461824
29	Brebes	85384	81116	99493	99889	91470,5
30	Kota Magelang	423764	531187	723307	762210	610117
31	Kota Surakarta	522588	573661	264390	1149755	627598,5
32	Kota Salatiga	29343	26930	25750	16325	24587
33	Kota Semarang	671633	709759	480751	1105526	741917,3
34	Kota Pekalongan	155075	134326	120492	129289	134795,5
35	Kota Tegal	161242	161944	231346	229522	196013,5
	jumlah	12181746	13195723	14840685	16764761	14245729
	rata-rata	348049,8857	377020,7	424019,6	478993,2	407020,8

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka, beberapa tahun

Pada Tabel 4.3, perkembangan banyaknya wisatawan baik asing maupun nusantara cenderung menurun pada tahun 1998 disebabkan krisis ekonomi yang melanda dan sejak tahun 2000 telah meningkat cukup baik terutama wisatawan nusantara, sedangkan wisatawan asing perkembangannya masih relatif lambat karena permasalahan yang terkait dengan citra Indonesia diluar negeri yang dianggap sedang mengalami ketidak stabilan politik dan kerusuhan sosial diberbagai tempat.

Bila dilihat distribusi wisatawan tiap kabupaten / kota (Tabel 4.4), maka kabupaten / kota yang memiliki daerah tujuan wisata terkenal baik ditingkat nasional maupun internasional lebih mudah menyedot wisatawan dibanding dengan daerah- daerah yang memiliki daerah tujuan wisata yang kurang terkenal. Hal ini menunjukkan bahwa faktor promosi juga memegang peranan penting dalam menyedot wisatawan sebanyak – banyaknya sebab masih begitu banyak daerah tujuan wisata bagus yang semestinya bisa “dijual” pada pasar yang lebih luas.

Kabupaten Magelang memiliki jumlah wisatawan terbanyak karena keberadaan Candi Borobudur, Kabupaten Demak di peringkat ke dua dengan Masjid Demak , Kabupaten Klaten memiliki Candi Prambanan, Kota Surakarta dengan Keraton Solo. Kabupaten/ kota tersebut mampu menjaring wisatawan terbanyak karena memiliki daerah tujuan wisata andalan. Dari data tersebut, terlihat bahwa jumlah wisatawan nusantara tetap merupakan pasar yang tetap perlu banyak digarap karena ternyata

kuantitasnya lebih banyak yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan penerimaan dari sektor pariwisata daerah setempat

4.5. Jumlah Hotel

Prasarana pendukung pariwisata salah satunya adalah hotel berbintang dan hotel melati. Di Jawa tengah diketahui jumlah hotel berklasifikasi bintang sebanyak 90 unit dengan jumlah kamar sebanyak 5.216 unit dan terbanyak berada di kota Semarang dan Surakarta. Sedangkan hotel melati berjumlah 919 unit dengan jumlah kamar sebanyak 15.635 unit, paling banyak berada di Kota Semarang, Surakarta dan Kabupaten Banyumas.

Dari Tabel 4.5, terlihat bahwa jumlah hotel masih sangat minimal di banyak daerah sehingga kurang potensial sebagai sumber penerimaan pajak. Tercatat hanya beberapa daerah yang mempunyai potensi pajak cukup besar untuk mendapat pemasukan dari sektor hotel yaitu Kota Semarang, Banyumas dan Surakarta.

Pada saat ini , kabupaten/ kota dengan jumlah hotel sedikit tentunya tidak bisa mengandalkan pemasukan dari sektor ini, sehingga perlu mengembangkan sektor – sektor lain yang pada akhirnya akan bisa meningkatkan kebutuhan akan hotel / penginapan baik untuk pelaku bisnis, maupun wisatawan . Pada saat itu lah pemasukan dari sektor hotel dapat bergerak naik secara signifikan.

Tabel 4.5
Jumlah Hotel menurut kabupaten / kota
Di Propinsi Jawa tengah (1998-2001)

No	Kab/Kota	1998	1999	2000	2001	rata-rata
1	Cilacap	41	38	43	41	40,75
2	Banyumas	130	135	147	141	138,25
3	Purbalingga	6	6	6	6	6
4	Banjarnegara	9	9	10	9	9,25
5	Kebumen	20	20	20	22	20,5
6	Purworejo	13	13	14	14	13,5
7	Wonosobo	26	26	21	29	25,5
8	Magelang	18	18	22	17	18,75
9	Boyolali	5	5	6	5	5,25
10	Klaten	28	28	29	29	28,5
11	Sukoharjo	5	5	6	5	5,25
12	Wonogiri	14	15	15	15	14,75
13	Karanganyar	40	40	44	88	53
14	Sragen	4	4	4	4	4
15	Grobogan	10	10	9	10	9,75
16	Blora	18	18	20	18	18,5
17	Rembang	11	9	10	10	10
18	Pati	21	21	24	22	22
19	Kudus	13	12	14	13	13
20	Jepara	9	7	8	8	8
21	Demak	2	2	1	2	1,75
22	Semarang	131	136	129	166	140,5
23	Temanggung	6	6	8	6	6,5
24	Kendal	10	10	14	13	11,75
25	Batang	4	4	4	4	4
26	Pekalongan	1	1	1	1	1
27	Pemalang	6	6	5	6	5,75
28	Tegal	13	13	12	22	15
29	Brebes	3	3	3	3	3
30	Kota Magelang	18	18	17	18	17,75
31	Kota Surakarta	113	113	117	126	117,25
32	Kota Salatiga	8	8	7	8	7,75
33	Kota Semarang	84	84	82	87	84,25
34	Kota Pekalongan	19	19	24	19	20,25
35	Kota Tegal	23	24	25	22	23,5
	jumlah	882	886	921	1009	924,5
	rata-rata	25,2	25,31429	26,31429	28,82857	26,41429

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka, beberapa tahun

4.6. Jumlah Investasi Pemerintah

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dalam era otonomi daerah diharapkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta kemandirian daerah. Pembangunan daerah disusun berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan, yakni Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) dan sebelumnya didasarkan atas Pola Dasar Program (POLDAS), Rencana Pembangunan Lima Tahunan Daerah (REPELITADA) dan Rencana Umum Pembangunan Tahunan (RUPTD). Pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam bentuk proyek-proyek pembangunan daerah yang dilaksanakan setiap tahun anggaran dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dilihat dari dua sisi yaitu sumber dana pembangunan (Pemerintah Pusat (APBN Sektoral, INPRES), Pemerintah Propinsi (APBD Propinsi (sektoral dan Bantuan Kepada Daerah Bawah (2P.0.A) dan APBD Kabupaten/kota), dan sektor pembangunannya (20 sektor pembangunan). Sektor-sektor pembangunan itu meliputi (1) Sektor Industri; (2) Pertanian dan Kehutanan; (3) Sumberdaya Air dan Irigasi; (4) Tenaga Kerja; (5) Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi; (6) Transportasi (7) Pertambangan dan Energi; (8) Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah; (9) Pembangunan Daerah dan Pemukiman;

(10) Lingkungan Hidup dan Tata Ruang; (11) Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olahraga; (12) Kependudukan dan Keluarga Berencana; (13) Kesehatan, Kesejahteraan Sosial. Peranan Wanita, Anak dan Remaja; (14) Perumahan dan Pemukiman; (15) Agama; (16) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (17) Hukum (18) Aparatur Pemerintah dan Pengawasan; (19) Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa; (20) Keamanan dan Ketertiban Umum, dan Subsidi kepada Daerah Bawahan.

Anggaran pembangunan yang berasal dari Pemerintah pusat dapat berasal dari dana INPRES (Inpres Sekolah Dasar, Inpres Pasar, Inpres Jalan, Inpres Penghijauan) dan APBN Sektoral yang dilaksanakan di daerah. Sedangkan pengeluaran pembangunan yang berasal dari dana APBD Propinsi merupakan pembelanjaan pembangunan oleh pemerintah propinsi yang dilaksanakan yang dilaksanakan di daerah. Sejak tahun anggaran 2001 bersamaan dengan diberlakukannya UU No, 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemernitah Pusat dan Daerah, maka sumber penerimaan dari pusat dalam bentuk *Block Grant* , yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan *Specific Grant*, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), sebagai pengganti dana Inpres sebelumnya. Hal ini menyebabkan meningkatnya besar APBD Kabupaten/kota sebagai konsekuensi dari diserahkannya beberapa kewenangan propinsi dan pusat ke daerah.

Tabel 4.6
Besarnya Realisasi Pengeluaran Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota
Di Jawa Tengah Tahun 1998 - 2001 (dalam juta Rupiah)

No	Kab/Kota	1998	1999	2000	2001	Rata-rata
1	Cilacap	25.767,940	50.743,370	31.278,441	33.056,118	35.211,47
2	Banyumas	18.578,785	30.179,053	24.040,715	27.526,371	25.081,23
3	Purbalingga	10.550,602	18.686,696	13.698,664	74.362,886	29.324,71
4	Banjarnegara	17.096,650	18.459,730	14.465,586	18.540,688	17.140,66
5	Kebumen	19.756,311	25.956,757	17.860,709	19.885,895	20.864,92
6	Purworejo	11.184,269	18.035,838	19.215,191	77.083,876	31.379,79
7	Wonosobo	11.474,466	19.071,527	13.154,428	26.958,400	17.664,71
8	Magelang	18.407,782	15.658,441	19.136,927	26.472,567	19.918,93
9	Boyolali	12.182,519	20.251,688	16.004,005	20.875,893	17.328,53
10	Klaten	15.169,317	21.397,452	18.311,190	34.923,423	22.450,35
11	Sukoharjo	14.484,417	17.211,033	12.978,672	27.558,319	18.058,11
12	Wonogiri	19.834,368	23.246,222	18.807,899	27.879,220	22.441,93
13	Karanganyar	13.385,627	17.730,970	15.148,285	43.480,751	22.436,41
14	Sragen	22.640,127	14.307,471	14.752,423	44.814,842	24.128,72
15	Grobogan	16.849,233	22.558,657	16.547,752	19.691,177	18.911,70
16	Blora	15.368,463	21.302,105	16.290,585	100.138,655	38.274,95
17	Rembang	11.816,397	17.081,561	13.979,022	39.366,829	20.560,95
18	Pati	15.793,075	25.037,926	18.348,778	50.801,600	27.495,34
19	Kudus	16.661,505	14.963,548	12.953,454	33.417,213	17.998,93
20	Jepara	18.986,196	23.262,357	19.569,944	29.012,640	22.707,78
21	Demak	13.469,522	16.917,410	12.004,012	10.971,855	13.340,70
22	Semarang	17.695,696	22.134,606	17.073,343	43.190,649	25.023,57
23	Temanggung	10.342,025	10.881,962	14.440,223	57.897,719	23.390,48
24	Kendal	17.603,200	23.299,700	16.467,833	139.977,562	49.337,07
25	Batang	10.351,871	18.627,420	14.317,933	47.541,081	22.709,58
26	Pekalongan	12.681,005	11.628,046	12.558,821	37.652,873	18.630,19
27	Pemalang	16.080,946	22.884,321	19.483,059	44.455,343	25.725,92
28	Tegal	19.640,342	30.707,392	23.889,895	74.993,678	37.307,83
29	Brebes	21.305,899	22.105,104	20.149,230	22.160,276	21.430,13
30	Kota Magelang	4.469,288	5.243,062	7.028,937	27.918,295	11.164,90
31	Kota Surakarta	9.244,948	27.492,995	59.922,373	60.614,685	39.318,75
32	Kota Salatiga	3.380,673	5.574,528	7.533,218	13.354,027	7.460,61
33	Kota Semarang	28.635,485	37.100,574	80.649,751	296.240,451	110.656,57
34	Kota Pekalongan	4.100,953	10.155,562	10.880,567	17.024,926	10.540,50
35	Kota Tegal	6.006,693	11.841,204	7.550,738	18.860,683	11.064,83
	JUMLAH	514.996,60	711.736,29	670.492,60	1.688.701,47	896.481,74
	Rata-rata	14.714,19	20.335,32	19.156,93	48.248,61	25.613,76

Sumber : Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Tengah, dari berbagai tahun

Pada Tabel 4.6 terlihat bahwa besarnya anggaran pembangunan pemerintah daerah Kabupaten/kota pada tahun 2001 adalah sebesar 1.608.701 juta rupiah. Kota Semarang sebagai ibukota propinsi merupakan daerah dengan anggaran pembangunan daerah terbesar yaitu 296.240 juta rupiah atau 11,16 % dari jumlah rata-rata daerah di Jawa Tengah, disusul kemudian Kendal 139.978 juta rupiah atau 4,78 % dari jumlah rata-rata daerah di Jawa Tengah, dan Blora 100.139 juta rupiah atau 4,41 % dari jumlah rata-rata daerah di Jawa Tengah. Sedangkan Kabupaten Demak merupakan daerah dengan jumlah anggaran pembangunan terkecil, yaitu 10.972 juta rupiah. Hal ini dapat dipahami karena dengan membandingkan anggaran pembangunan dengan jumlah keseluruhan

Jumlah keseluruhan pengeluaran pembangunan pemerintah daerah yang berasal dari APBD Kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2001 adalah sebesar Rp. 1,688,701.466 juta. Peningkatan tertinggi anggaran pembangunan daerah terjadi pada tahun 2001, yaitu sebesar 151,56 %, hal ini sebagai konsekuensi dari mulai dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Pada tahun 1998 ini sebagai akibat adanya krisis ekonomi yang menyebabkan penurunan pada sisi penerimaan dari daerah, sedangkan penurunan APBD pada tahun 2000, lebih disebabkan karena masa transisi (peralihan) dari sistem anggaran pemerintah, dimana pada tahun tersebut dimulai dari bulan April sampai dengan Desember (9 bulan).

4.7. Jumlah Daya Listrik Tersambung

Listrik merupakan salah satu sumber energi utama dalam kegiatan produktif di masyarakat. Tersedianya energi listrik juga akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk tinggal di suatu daerah. Daya listrik tersambung digunakan sebagai sarana penerangan, sumber energi bagi peralatan rumah tangga, industri, perkantoran dan kegiatan produksi lainnya. Semakin meningkat pendapatan masyarakat maka kebutuhan akan listrik akan menjadi semakin besar, demikian juga dalam suatu perusahaan semakin besar usaha dan semakin modern peralatan yang digunakan maka ketergantungan akan sumber energi listrik semakin besar.

Produksi energi listrik di Jawa Tengah terdapat di beberapa daerah (kabupaten/kota) seperti Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Semarang, Cilacap dan Wonosobo. Energi listrik ini diproduksi dengan berbagai teknologi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Dieng. Pada tahun 2001 jumlah energi listrik yang di produksi di Jawa Tengah sebesar 5.642.112 MWh. Untuk menghubungkan energi listrik yang telah dihasilkan agar dapat di distribusikan, maka dihubungkan dalam jaringan interkoneksi pengatur beban yang ada di Ungaran, Kabupaten Semarang.

Di Jawa Tengah terdapat 10 cabang distribusi PT. PLN (Persero), yaitu Semarang (meliputi ranting/rayon Semarang, Kendal, Purwodadi,

Demak) , Surakarta (Surakarta, Karanganyar, Sragen, Wonogiri dan Sukoharjo), Purwokerto (Purwokerto, Banyumas, Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga), Tegal (Tegal, Pemalang, Slawi, Brebes), Magelang (Magelang, Purworejo, Temanggung, Muntilan), Kudus (Kudus, Pati, Jepara, Rembang, Blora), Salatiga (Salatiga, Ungaran, Ambarawa), Klaten (Klaten, dan Boyolali), dan Pekalongan (Pekalongan dan Batang), Cilacap (Cilacap dan Kebumen). Pembagian batas wilayah kerja dari masing masing cabang tidak selalu sama dengan batas administrasi Kabupaten/kota.

Pengguna listrik PLN di Jawa Tengah secara umum dapat dikelompokkan dalam 6 (enam) kelompok, yaitu :

1. Kelompok Rumah tangga
2. Kelompok Industri
3. Kelompok Usaha
4. Kelompok Sosial
5. Kelompok Kantor Pemerintah
6. Kelompok Penerangan Jalan

Kelompok rumah tangga merupakan terbesar dalam jumlah pelanggan dan pengguna daya listrik. Berdasarkan data tahun 2001, di Jawa Tengah terdapat 4.388.881 pelanggan rumah tangga dan menyerap 2.672.611 KVA daya listrik tersambung. Dari sisi penggunaan daya listrik tersambung persatuan pelanggan, maka kelompok rumah tangga adalah

yang terkecil, yaitu rata-rata setiap pelanggan hanya menggunakan daya listrik sebesar 0,609 KVA.

Kelompok industri dari sisi jumlah pelanggan relatif lebih kecil, yaitu hanya 4.288 pelanggan, namun dari sisi pengguna daya listrik adalah terbesar kedua setelah kelompok rumah tangga, yaitu sebesar 951.557 KVA atau rata rata satu pelanggan membutuhkan daya listrik sebesar 221,912 KVA.

Kelompok pelanggan jenis usaha di Jawa Tengah terdapat 131.844 pelanggan dan membutuhkan daya listrik sebesar 424.252 KVA atau rata-rata setiap pelanggan membutuhkan daya listrik terpasang sebesar 3,218 KVA. Sedangkan jumlah daya listrik tersambung di Jawa Tengah pada tahun 2001 sebesar 4.280.674,151 KVA. Namun demikian berdasarkan data dari PT PLN bahwa di Jawa Tengah masih terdapat daerah yang belum berlistrik, yaitu sebanyak 73 desa yang tersebar di beberapa kabupaten, seperti Jepara, Cilacap, Tegal, Banyumas, Blora, Boyolali, Kebumen dan Batang.

Tabel 4.7
Besarnya daya listrik tersambung
menurut kabupaten/ kota di Jawa Tengah Tahun 1998-2001
(dalam kwh)

No	Kab/Kota	1998	1999	2000	2001	rata-rata
1	Cilacap	163989	174850	197692	210559	186772,5
2	Banyumas	119453	129223	144694	159126	138124
3	Purbalingga	44584	50185	56596	62631	53499
4	Banjarnegara	34372	38951	46220	54232	43443,75
5	Kebumen	69085	81057	88711	96700	83888,25
6	Purworejo	62104	67062	73999	79900	70766,25
7	Wonosobo	48463	52891	57635	60998	54996,75
8	Magelang	50411	53194	59359	63220	56546
9	Boyolali	60845	59081	65587	68913	63606,5
10	Klaten	124930	133239	144490	154562	139305,3
11	Sukoharjo	178546	103694	111464	121665	128842,3
12	Wonogiri	75869	82547	91794	100742	87738
13	Karanganyar	111441	122158	129020	138643	125315,5
14	Sragen	105371	119246	126680	134893	121547,5
15	Grobogan	104574	110835	125437	131721	118141,8
16	Blora	61649	65820	73686	78738	69973,25
17	Rembang	35164	38334	42309	45563	40342,5
18	Pati	97489	106046	116210	127172	111729,3
19	Kudus	114415	125488	134078	145182	129790,8
20	Jepara	69862	79858	92136	104929	86696,25
21	Demak	54379	57417	64327	68964	61271,75
22	Semarang	100914	108739	122086	137751	117372,5
23	Temanggung	57787	63747	68689	72903	65781,5
24	Kendal	174821	194106	204704	201672	193825,8
25	Batang	43359	48204	56670	60187	52105
26	Pekalongan	60069	68370	72349	54336	63781
27	Pemalang	76821	81548	87091	95097	85139,25
28	Tegal	58364	61662	67996	75303	65831,25
29	Brebes	83027	88814	100911	111761	96128,25
30	Kota Magelang	71314	75410	83594	90567	80221,25
31	Kota Surakarta	130094	220737	236154	254280	210316,3
32	Kota Salatiga	67078	71222	78721	84470	75372,75
33	Kota Semarang	563085	582872	621147	665381	608121,3
34	Kota Pekalongan	45484	47430	50325	78790	55507,25
35	Kota Tegal	74322	77950	83600	89119	81247,75
	jumlah	3393534	3641987	3976161	4280670	3823088
	rata-rata	96958,11	104056,8	113604,6	122304,9	109231,1

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka, beberapa tahun

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Pengujian Data

Pengujian model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini sangat menentukan hasil analisis berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Namun demikian sebelum melakukan uji terhadap model regresi berganda yang ada, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu sehingga hasil model regresi yang diharapkan akan benar-benar sebagai suatu model regresi yang baik dan efisien.

5.1.1. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi ada tidaknya penyakit yang terdapat dalam model regresi yang digunakan seperti multikolinieritas, heteroskedastisitas dan outokorelasi. Apabila ada penyimpangan terhadap asumsi klasik tersebut, maka hasil uji t dan uji F yang dilakukan menjadi tidak valid dan secara statistik dapat mengacaukan kesimpulan yang diperoleh.

Tabel 5.1.
Hasil Perhitungan Persamaan Regresi Awal

Dependent Variable: L_R
Method: Least Squares
Date: 08/26/03 Time: 00:10
Sample: 1 140
Included observations: 140

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	-5.133426	0.931859	-5.508802	0.0000
L_PP	0.324929	0.084200	3.859003	0.0002
L_W	0.101323	0.027916	3.629584	0.0004
L_H	0.069100	0.035727	1.934127	0.0552
L_IG	0.397857	0.062499	6.365816	0.0000
L_DL	0.664401	0.091922	7.227910	0.0000
R-squared	0.752839	Mean dependent var		7.841006
Adjusted R-squared	0.743617	S.D. dependent var		0.791602
S.E. of regression	0.400822	Akaike info criterion		1.051314
Sum squared resid	21.52822	Schwarz criterion		1.177384
Log likelihood	-67.59196	F-statistic		81.63132
Durbin-Watson stat	1.859943	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber : Lampiran 3 .

5.1.1.1 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah adanya hubungan eksaklinier antar variabel penjelas. Multikolinieritas diduga terjadi bila nilai R^2 tinggi tetapi nilai semua atau sebagian besar variabel penjelas tidak signifikan dan nilai F-hitung tinggi. Pengujian terhadap ada tidaknya multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan cara regresi parsial, yaitu membandingkan nilai R^2 dari model regresi awal atau utama dengan R^2 model *auxiliary regression* antar variabel penjelas. Apabila nilai R^2 dari model regresi awal atau utama

lebih tinggi dari R^2 model *auxiliary regression* antar variabel penjelas maka tidak terdapat multikolinieritas.

Dari hasil pengujian ternyata memperlihatkan nilai R^2 dari model regresi awal atau utama (0,743617) lebih tinggi dari nilai R^2 model *auxiliary regression* antar variabel penjelas seperti terlihat pada Tabel 5.1. Dengan demikian model penelitian tidak terdapat multikolinieritas antara variabel penjelas.

Tabel 5.2

Perbandingan Nilai R^2 dari model regresi awal atau utama dengan R^2 model *auxiliary regression* antar variabel penjelas

No.	Model Regresi	Nilai R^2
1	Model Regresi Awal $L_R = f\{L_{PP}, L_H, L_W, L_{IG}, L_{DL}\}$	0,743617
2	$L_{PP} = f\{L_H, L_W, L_{IG}, L_{DL}\}$	0.299941
3	$L_H = f\{L_{PP}, L_W, L_{IG}, L_{DL}\}$	0.281727
4	$L_{IG} = f\{L_{PP}, L_H, L_W, L_{DL}\}$	0.273748
5	$L_W = f\{L_{PP}, L_H, L_{IG}, L_{DL}\}$	0.082936
6	$L_{DL} = f\{L_{PP}, L_H, L_{IG}, L_W\}$	0.520844

Sumber : Lampiran 3 dan 4

5.1.1.2. Uji Autokorelasi.

Autokorelasi terjadi bila nilai gangguan dalam periode tertentu berhubungan dengan nilai gangguan sebelumnya. Pengujian ada tidaknya autokorelasi digunakan dengan menggunakan uji d -Durbin Watson (DW-test). *Breusch-Godfrey test*. Berdasarkan tabel statistik d -Durbin Watson pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$ dengan $n = 140$, $k = 5$ diketahui bahwa $d_l =$

1,665 dan du 1,802. Hasil perhitungan DW sebesar 1.8599, hal ini berarti berada pada daerah bebas autokorelasi. Demikian juga dengan hasil *Breusch-Godfrey test* dimana probabilitas dari $obs \cdot R\text{-squared}$ sebesar 0.632 (63,2 %) di mana lebih besar dari nilai α 5 %, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi (lihat lampiran 4).

5.1.1.3. Uji Heteroskedastisitas.

Penyimpangan terhadap asumsi homoskedastisitas disebut dengan heteroskedastisitas. Hal ini terjadi bila distribusi probabilitas tidak sama dalam semua observasi x dan varian setiap residual tidak sama untuk semua nilai variabel penjelas. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *White Heteroskedasticity*. Pada pengujian ini apabila nilai probabilitas dari $obs \cdot R\text{-square statistic}$ lebih kecil dari nilai α (α) yang ditentukan dalam hal ini 0,05 maka hipotesis H_0 : Homoskedastisitas ditolak dengan kata lain terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini nilai α (α) yang ditentukan adalah sebesar 5 %. Hasil pengujian *White Heteroskedasticity* menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya ternyata lebih kecil dari 5 %, yaitu 2,2179 % (0,022179), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 : homoskedastisitas dapat ditolak dengan kata lain terjadi penyimpangan heteroskedastisitas.

Untuk menghilangkan atau mengobati masalah heteroskedastisitas dalam model empiris yang digunakan, maka digunakan dengan

menggunakan metode kuadrat terkecil tertimbang (*weighted least squares = WLS*)

Persamaan regresi yang dihasilkan dengan menggunakan kuadrat terkecil tertimbang adalah sebagai berikut : dengan membandingkan nilai *sum squared resid* antara persamaan regresi awal sebesar 21,52822 dan persamaan regresi tertimbang sebesar 0,185803, dimana persamaan regresi tertimbang jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai *sum squared resid* persamaan awal, maka dapat dikatakan penyakit heteroskedastisitas telah hilang. Hal ini memberikan arti bahwa persamaan regresi tertimbang telah bebas dari penyakit asumsi klasik dan dikatakan baik sehingga dapat dianalisis nilai F dan t- hitungnya

Tabel 5.3.

Hasil Persamaan Regresi Tertimbang

Dependent Variable: WLR
Method: Least Squares
Date: 08/31/03 Time: 15:32
Sample: 1 140
Included observations: 140

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.476902	0.086571	-5.508802	0.0000
WLPP	0.324929	0.084200	3.859003	0.0002
WLW	0.101323	0.027916	3.629584	0.0004
WLH	0.069100	0.035727	1.934127	0.0552
WLIG	0.397857	0.062499	6.365816	0.0000
WLDL	0.664401	0.091922	7.227910	0.0000
R-squared	0.752839	Mean dependent var		0.728440
Adjusted R-squared	0.743617	S.D. dependent var		0.073541
S.E. of regression	0.037237	Akaike info criterion		-3.701121
Sum squared resid	0.185803	Schwarz criterion		-3.575051
Log likelihood	265.0785	F-statistic		81.63132
Durbin-Watson stat	1.859943	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber : Lampiran 6

5.1.2. Pengujian Statistik

Uji statistik dari model regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : uji signifikansi parameter secara bersama (uji statistik F), koefisien determinasi dan uji parameter secara individual (uji statistik t).

5.1.2.1 Uji Statistik F.

Uji statistik F merupakan uji ketepatan model yang merupakan uji ketepatan model yang merupakan uji simultan apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Nilai F yang besar lebih baik dibandingkan dengan nilai F hitung yang rendah. Sedangkan nilai prob. F merupakan tingkat signifikansi marginal dari uji-F. Dengan nilai probabilitas F, maka dapat dilakukan penolakan hipotesa H_0 jika nilai prob F kurang dari nilai α (α). Nilai α (α) yang digunakan adalah 5%. Dari hasil perhitungan seperti terlihat pada tabel 5.2. terlihat bahwa nilai probabilitas F-statistik adalah 0,0000 yang berarti jauh lebih kecil dari nilai α (0,05) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel yang dijelaskan, yaitu PDRB Kabupaten/kota. Dengan melihat nilai F-statistik sebesar 81.63132 yang jauh lebih besar dari nilai F-tabel (140,5) pada $\alpha = 0,05$ sebesar 2,29 yang berarti H_0 : ditolak.

5.1.2.2. Koefisien Determinasi (R^2).

R^2 untuk mengukur *goodness of fit*. Nilai *R-squared* (R^2) statistik mengukur tingkat keberhasilan model yang digunakan dalam memprediksi nilai variabel tak bebas, atau dengan kata lain, untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas tersebut secara bersama-sama dapat dilihat dari besarnya R^2 . Besarnya nilai R^2 berdasarkan hasil perhitungan adalah *adjusted R²* sebesar 0.743617 hal ini dapat diartikan bahwa 74,361 % variasi variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel penjelas (independen) di dalam model. Sedangkan sisanya sebesar 25,639 % dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya di luar model.

5.1.2.3. Uji Statistik t.

Uji statistik t (t-test) bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen secara individual terhadap terhadap variabel dependen. Signifikansi variabel secara individual ditunjukkan dari nilai probabilitas masing-masing variabel, dan dibandingkan dengan derajat kepercayaan yang ditentukan dalam hal ini 5 % (0,05).

Dari hasil perhitungan yang dilakukan dapat diketahui bahwa probabilitas variabel PDRB perkapita / PP (0,0002), Jumlah Wisatawan / W (0,0004), Jumlah Hotel / H (0,0552), Jumlah Anggaran Pembangunan Pemerintah Daerah / IG (0,0000) dan Penggunaan Energi Listrik / DL (0,0000) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak

Daerah Kabupaten/kota pada derajat α 5 % dan α 10 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penjelas kecuali jumlah hotel secara individu mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (yang dijelaskan).

5.2. Interpretasi Model

Hasil perhitungan analisis regresi dari studi empiris yang dilakukan maka dapat dituliskan bentuk model sebagai berikut :

$$R = -0,476 + 0,324 PP + 0,101 W + 0,069 H + 0,397 IG + 0,664 DL + \varepsilon t$$

$$t = (3,859) + (3,629) + (1,934) + (6,365) + (7,227)$$

$$R^2 = 0,743$$

$$DW = 1,859$$

Berdasarkan tabel 5.3 tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa pengaruh pendapatan perkapita (PDRB perkapita) terhadap penerimaan pemerintah daerah dalam hal ini pajak daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah ternyata signifikan dan berarah positif dengan nilai elastisitas sebesar 0,3249, Nilai ini berarti bahwa apabila tingkat pendapatan perkapita dalam hal ini PDRB perkapita masyarakat Kabupaten/kota di Jawa Tengah meningkat 1 persen, maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten/kota di Jawa Tengah sebesar 0.3249 persen.

Elastisitas jumlah wisatawan yang berkunjung terhadap penerimaan pajak daerah adalah sebesar 0,1013. Hal ini memberikan arti bahwa setiap

kenaikan 1 % jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata akan menyebabkan peningkatan pajak daerah sebesar 0,1013 %.

Elastisitas jumlah hotel yang ada terhadap penerimaan pajak daerah adalah sebesar 0,0691. Hal ini memberikan arti bahwa setiap kenaikan 1 % jumlah hotel akan menyebabkan peningkatan pajak daerah sebesar 0,0691 %.

Elastisitas jumlah anggaran pembangunan pemerintah daerah (Kabupaten/kota) terhadap penerimaan pajak daerah adalah sebesar 0,3978. Hal ini memberikan arti bahwa setiap kenaikan 1 % jumlah anggaran pembangunan pemerintah daerah akan menyebabkan peningkatan pajak daerah sebesar 0,3978 %.

Elastisitas jumlah energi listrik yang tersambung terhadap penerimaan pajak daerah adalah sebesar 0,6644. Hal ini memberikan arti bahwa setiap kenaikan 1 % jumlah daya listrik tersambung akan menyebabkan peningkatan pajak daerah sebesar 0,6644%.

Dari kelima variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa energi listrik merupakan variabel bebas yang memiliki elastisitas terbesar 0,6644 disusul kemudian anggaran pembangunan pemerintah daerah, PDRB perkapita, jumlah wisatawan dan jumlah hotel.

Nilai elastisitas berkisar antara 0 – 1, dimana semakin besar nilai elastisitas maka variabel dinilai semakin elastis. Energi listrik memiliki elastisitas yang tertinggi. Hal ini memberikan indikasi bahwa penggunaan

energi listrik di Jawa Tengah relatif lebih berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Dengan meningkatnya penggunaan energi listrik maka diharapkan dapat meningkatkan pajak penerangan jalan yang dipungut bersamaan dengan pembayaran rekening listrik.

5.3. Pembahasan

Berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah bahwa besarnya pajak penerangan jalan (PPJ) setinggi-tingginya adalah 10 % dari jumlah tagihan rekening listrik yang dipungut dari pelanggan listrik PLN. Selanjutnya disebutkan bahwa besarnya pajak tersebut ditetapkan dengan Perda. Namun berdasarkan Perda yang berlaku pada saat ini, ditetapkan besarnya pajak penerangan jalan adalah 9 % dari besarnya tagihan listrik yang dipungut oleh PLN. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dengan semakin besarnya energi listrik yang digunakan oleh masyarakat, maka menyebabkan semakin besarnya penerimaan pajak daerah yang disebabkan semakin besarnya penerimaan PLN dari pembayaran rekening listrik masyarakat dan pelaku usaha/swasta.

Anggaran pembangunan pemerintah daerah merupakan suatu bentuk investasi dari pemerintah daerah untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Anggaran pembangunan pemerintah ini digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintah daerah seperti untuk menyediakan infra

struktur seperti jalan, jembatan, pengairan, memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Anggaran pemerintah daerah ini diuraikan dalam 20 sektor pembangunan, dan tiap sektor terdiri beberapa sub sektor dan masing masing sub sektor terdiri dari satu atau lebih program pembangunan. Anggaran pembangunan ini merupakan bentuk penjabaran dari kegiatan pembangunan daerah yang utuh dan sinergis, dimana salah satu tujuan pembangunan tersebut adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, maka output yang dihasilkan menjadi semakin besar, dan pada akhirnya pajak yang dapat dipungut menjadi semakin besar. Dengan kata lain baik secara langsung maupun tidak langsung anggaran pembangunan pemerintah daerah berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah

Salah satu ukuran dari tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan perkapita yang diprosikan dari PDRB perkapita. Semakin besarnya pendapatan masyarakat maka diharapkan akan menyebabkan kemampuan membayar pajak masyarakat menjadi semakin besar. Pada penelitian ini juga terbukti bahwa pendapatan perkapita yang diprosikan dengan PDRB/ perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini sesuai dengan teori perpajakan bahwa penerimaan pajak akan sangat ditentukan oleh pendapatan perkapita dan jumlah penduduk (Musgrave dan Musgrave, 1989).

Pada penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya seperti yang dilaporkan Jaka Sriyana (1999) pada penelitian di 27 propinsi se Indonesia, dan Nawang Astaning Widiastuti (2000) pada penelitiannya di Jawa Timur bahwa pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap penerimaan pemerintah daerah (PAD).

Jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya seperti yang dilaporkan oleh Agus Wantara (1997) dalam penelitiannya di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nawang Astaning W (2000) dalam penelitiannya di Jawa Timur, bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah. Wisatawan baik domestik maupun yang berasal dari mancanegara senantiasa akan membelanjakan sebagian atau seluruh uang yang dibawa untuk keperluan akomodasi dan membeli cinderamata. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke daerah maka semakin banyak uang yang mengalir atau berputar di daerah sekitar obyek wisata. Kondisi akan mendorong timbulnya kegiatan ekonomi di daerah sekitar obyek wisata untuk melayani kebutuhan wisatawan dan menjual hasil produksi produksinya untuk diperdagangkan di sekitar obyek wisata. Dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung maka mendorong semakin besar kegiatan ekonomi masyarakat sekitar, dan semakin besar kegiatan ekonomi, maka pajak yang dapat dipungutpun menjadi semakin besar. Beberapa jenis pajak daerah yang dapat dipungut dalam kaitannya

dengan wisatawan yang berkunjung ke daerah adalah dari pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame.

Jumlah hotel memberikan pengaruh kurang signifikan terhadap penerimaan pemerintah dari sektor pajak daerah. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad Jamli dan Astuti Rahayu (1997) di Yogyakarta. Pendirian hotel di daerah pada umumnya dilakukan oleh swasta, dan sebagian kecil yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Hotel yang berdiri baik kelas melati maupun berbintang senantiasa dilandasi oleh peluang pasar yang ada atau didasarkan oleh permintaan pasar penginapan. Semakin besar atau banyak wisatawan yang berkunjung ke daerah maka permintaan tempat penginapan semakin besar. Dengan semakin banyak jumlah hotel yang ada di daerah memberikan gambaran semakin besarnya potensi turisme atau pariwisata daerah, dan semakin besar pula pajak daerah yang dapat dipungut dari kegiatan pada sektor perhotelan tersebut. Pajak hotel merupakan salah satu pajak daerah yang pemungutan dan penetapannya diserahkan daerah kabupaten / kota. Dengan demikian semakin banyak hotel yang ada di daerah maka menyebabkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel yang dapat dipungut pemerintah daerah menjadi semakin besar.

Jumlah hotel yang ada di kabupaten/kota jumlahnya relatif kecil dan penyebarannya tidak merata. Industri hotel cenderung berada pada kota-

kota besar dimana sektor jasa telah berkembang . Pada daerah dengan sektor utama / dominan pertanian industri perhotelan kurang berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dengan demikian dapat dipahami apabila jumlah hotel kurang berperan dalam penerimaan pemerintah dari sektor pajak daerah

Peranan hotel sebagai bagian dari industri jasa kepariwisataan dewasa ini juga perlu mendapat perhatian pemerintah. Hal ini disebabkan karena ditetapkannya sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat selain sektor industri dan pertanian. Dengan berkembangnya sektor pariwisata diharapkan akan memberikan dampak semakin berkembangnya sektor lain, yaitu perdagangan dan mendorong meningkatnya investasi di daerah. Menyadari hal tersebut pemerintah daerah Jawa Tengah pada saat ini mengembangkan kebijakan yang sinergis antara pariwisata, perdagangan dan investasi dalam suatu paket kegiatan promosi untuk memperkenalkan potensi ekonomi Jawa Tengah pada sektor swasta baik lokal, nasional maupun mancanegara.

BAB VI PENUTUP

6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 1998 – 2001 adalah pendapatan perkapita, jumlah wisatawan, anggaran pembangunan pemerintah daerah / investasi pemerintah daerah, daya listrik. Sedangkan jumlah hotel tidak berpengaruh secara signifikan.
2. Pengaruh daya listrik terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah cukup signifikan mengingat tingkat okupasinya yang demikian tinggi, dalam arti hampir sebagian besar wajib pajak membutuhkan daya listrik baik sebagai sarana produksi maupun kehidupan sehari – hari.
3. Pengaruh investasi terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah cukup signifikan karena semakin banyak investasi yang ditanamkan akan menambah jumlah wajib pajak baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga jumlah pajak yang dapat dikumpulkan makin banyak pula .
4. Pengaruh pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah cukup signifikan karena

apabila pendapatan rata-rata meningkat maka perubahan dalam pola konsumsi bagi perekonomian secara keseluruhan akan terjadi yang berakibat pada penerimaan pajak

5. Pengaruh wisatawan terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah cukup signifikan karena wisatawan merupakan subyek pajak terutama dari hotel dan restoran yang melakukan pembayaran (PP no 65 / 2001) sehingga laju wisatawan berpengaruh positif terhadap pajak daerah
6. Variabel jumlah hotel tidak signifikan, hal ini disebabkan karena Jumlah hotel yang ada di kabupaten/kota jumlahnya relatif kecil dan penyebarannya tidak merata. Industri hotel cenderung berada pada kota-kota besar dimana sektor jasa telah berkembang . Pada daerah dengan sektor utama / dominan pertanian industri perhotelan kurang berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dengan demikian dapat dipahami apabila jumlah hotel kurang berperan dalam penerimaan pemerintah dari sektor pajak daerah

6.2. Rekomendasi Kebijakan

Untuk mendorong peningkatan penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari pajak daerah maka peran pemerintah daerah sangat diperlukan terutama dikaitkan dengan kebijakan dan strategi pembangunan sebagai berikut :

1. Dengan besarnya elastisitas daya listrik terhadap penerimaan pajak daerah, maka pemerintah diharapkan mampu menyediakan daya listrik (khususnya daya listrik sebagai sarana produksi) yang seimbang dengan peningkatan kebutuhan masyarakat, mengingat pertambahan jumlah penduduk yang terjadi akan mempengaruhi peningkatan pemanfaatannya. Selain itu pengelolaan agar mutu baik juga perlu dilakukan sekaligus harga yang terjangkau karena semua itu akan sangat berpengaruh dalam penerimaan pajak daerah
2. Anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota sebaiknya digunakan untuk mengembangkan ekonomi daerah yang berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, sehingga kemampuan masyarakat dalam membayar pajak daerah semakin meningkat.
3. Untuk menggugah kesadaran masyarakat membayar pajak , investasi pemerintah daerah perlu ditingkatkan terutama pada jenis investasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Dengan adanya rasa percaya pada masyarakat bahwa pajak yang mereka bayarkan telah dimanfaatkan dengan baik, diharapkan masyarakat tergugah untuk taat membayar kewajiban pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahjono dan M Fakhri Husein . 2000. *Perpajakan*. Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta
- Agus Wantara.1997 . Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Pemerintah Pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta (1970 – 1992) , *Kinerja – Jurnal Bisnis dan Ekonomi* Program Pasca Sarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta No. 2 / Januari 1997 , Hal.41-60
- Ahmad Djamli dan Astuti Rahayu . 1997 .. Analisis Pajak Pembangunan I Perhotelan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus : Kotamadya Yogyakarta) , *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 2 No. 3 , hal 312 – 323.
- Alfian Lains . 1985 . *Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru*. Prisma No 4 1985
- Amin Widjaja Tunggal . 1995. *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*. Rineka Cipta , Jakarta
- Damodar Gujarati .1995. *Ekonometrika Dasar*. Penerbit Erlangga, Jakarta
- Davey, KJ . 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek – Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, penerjemah Amanullah,dkk , UI-Press, Jakarta.
- Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI-Press, Jakarta
- Dumairy. 1999. *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Elia Radianto. 1997. “*Derajat Otonomi Fiskal Studi Kasus Kabupaten Dati II Maluku*“, Prisma No 7, 24-37.
- Guritno Mangkusubroto . 1993 . *Ekonomi Publik*. Penerbit BPFE , Yogyakarta.
- Hirawan B Susiyanti. 1991. *Profil Ekonomi Indonesia Jangka Pendek dan Sumber Pembiayaan Pembangunan*, Jakarta FE – UI dan Gramedia Pustaka.
- Jaka Sriyana . 1999 . Hubungan Keuangan Pusat- Daerah, Reformasi Perpajakan dan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Daerah, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol 4 no 1 hal 312-323.
- Kristiadi, JB. 1985, Naskah Sekitar Peningkatan Pendapatan Daerah, Majalah Prisma No. 12 Tahun XIV, hal 22 – 33

- Lains, Alfian 1985. Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru. Majalah Prisma No. 4 Tahun XIV hal 40 – 57
- Liberty Pandiangan .2002 . Pajak Pusat Dan Pajak Daerah Dalam Kerangka Sistem Perpajakan Nasional. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Volume 1 No 7 , Februari.
- Lumban Toruan, Sophar.1997.*Ensiklopedi Perpajakan Indonesia*,Erlangga,Jakarta
- Mardiasmo. 2000. *Perpajakan* , Penerbit Andi, Yogjakarta
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi . 1987 . *Metode Penelitian Survey*. LP3ES ,Jakarta .
- Miyasto dkk .1990 . Masalah – masalah Perpajakan di Indonesia. *MEB* Vol II no 1 Edisi Khusus Lustrum, Maret
- Munawar Ismail. 2001. Pandapatian Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah, *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya*, Malang
- Nawang Astaning Widhiastuti . 2000.Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur Tahun 1987-1988, *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya*.
- Sadono Sukirno, 1999, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Samuelson PA dan Nordhaus,Willian D .1995. “ *Economics* “, 15th edition, Mc.Graw Hill, Toronto.
- Spillane, James J. 1987 . *Ekonomi Pariwisata : Sejarah dan Prospeknya*, Penerbit Kanisius , Yogjakarta
- Sudarsono .1994. *Aturan Bea Materai dan Kebijakanaksanaan Pajak*. Rineka Cipta , Jakarta.
- Sumarso SR .1998. Dampak Reformasi Perpajakan 1984 terhadap Efisiensi Sistem Perpajakan Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia* Vol XLVI No 3 .
- Sutrisno PH. 1982. *Dasar Ilmu Keuangan Negara*, FE-UGM, Yogjakarta.
- Wahyu Widayat . (2000) . Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah Sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, STIE YKPN.

Waluyo dan Wirawan. 1999. *Perpajakan Indonesia*, Salemba 4, Jakarta

Yoeti, OKA. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Penerbit Angkasa, Bandung.